



IRPIA

VOLUME 8 NOMOR 3; DESEMBER 2022

Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan

PENERBIT:

Institut Riset dan Pengembangan Indonesia

2022

ejournal.irpia.or.id



EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Djoko Siswanto Muhartono

Institut Riset dan Pengembangan Indonesia, Indonesia
SINTA ID: 6036063

Managing Editor

Sri Wahyuni

Universitas Hang Tuah, Indonesia
SINTA ID: 6021711

Editor in Board

Sri Umiyati

Universitas Hang Tuah, Indonesia
SINTA ID: 6654316

Lukman Arif

UPN Veteran Jatim, Indonesia
SINTA ID: 5989038

Ika Devy Pramudiana

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia
SINTA ID: 6671616

Fajar Surahman

Universitas Madura, Indonesia
SINTA ID: 6751551

Irma Irawati Puspaningrum

Universitas Wiraraja, Indonesia
SINTA ID: 6653921

IT/Administration

Supriyanto

Universitas Wijaya Putra, Indonesia

Jl. Cendana N-19, Perum Canda Bhirawa Asri Kediri – 64182
Phone: 081234456769

PENERBIT:

Institut Riset dan Pengembangan Indonesia

ejournal.irpia.or.id

DAFTAR ISI

Mixed Methods: Kompetensi dan Motivasi Kerja dalam Peningkatan Kinerja
Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Desa Parsanga Kabupaten Sumenep

Wilda Rasaili, Helmy Lathifa Khamsi, Yayak Nurwahyudi 1-9

Analisis Dimensi Dan Peran Aktor Sound Governance dalam Kerja Sama
Sister City Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool
(Studi Kasus Pengiriman Sepuluh Pesepakbola Muda Berbakat)

*Dzakiyah Adalatul Hikmah, Khusnul Prasetyo, Aditama Azmy Musaddad, Eka Arum
Pramestya, Ika Devi Lestari* 10-20

Kinerja Pegawai Perpustakaan Sekolah dalam Peningkatan Pelayanan

Guntur Dwi Hermawan, Oni Dwi Jayanti, Rofik Rofik 11-34

Implementasi Program Merdeka Belajar Menuju Era Society 5.0

Rachmalia Novita Cahyani, Aisyah Aulia Zahro, Achmad Arrizal Afifuddin 35-43

Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi Sebagai Alternatif Pengurangan
Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya

Victoria Fitriyanti, Hariani Devita 44-52

Mixed Methods: Kompetensi dan Motivasi Kerja dalam Peningkatan Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Desa Parsanga Kabupaten Sumenep

Helmy Lathifa Khamsi¹, Wilda Rasaili^{2*}, Yayak Nurwahyudi³

^{1,2,3} Administrasi Publik, Universitas Wiraraja Madura

*Corresponding author: wilda@wiraraja.ac.id

Abstrak

Artikel ini berupaya menjelaskan pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja pengurus BUMDes Camar Desa Parsanga Kecamatan Kota Sumenep baik secara parsial maupun simultan. BUMDes sebagai organisasi yang mengelola pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa diharapkan memiliki kinerja pengurus yang baik guna memaksimalkan peran dan fungsi organisasi. Kinerja erat kaitannya dengan kompetensi dan motivasi kerja. Metode yang digunakan yaitu campuran, diawali kuantitatif dan dilanjutkan pada kualitatif. Secara kuantitatif pengumpulan data melalui kuesioner pada 24 responden. Teknik analisis data regresi linear berganda, uji t dan uji F. Hasil uji t variabel kompetensi (X_1) tingkat signifikansi 0,011. Sedangkan nilai t_{hitung} 2,809 dan t_{tabel} 2,080 ($2,809 > 2,080$), artinya berpengaruh signifikan. Hasil uji t variabel motivasi kerja (X_2) menunjukkan tingkat signifikansi 0,001. Sedangkan nilai t_{hitung} 4,063 dan t_{tabel} 2,080 ($4,063 > 2,080$), artinya berpengaruh signifikan. Hasil uji F menunjukkan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan nilai F_{hitung} 18,175 dan F_{tabel} 3,44 ($18,175 > 3,44$) artinya kompetensi dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Nilai koefisien determinasi (R^2) 0,634 diartikan kinerja dipengaruhi oleh kompetensi dan motivasi kerja sebesar 63,4%, sisanya 36,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian secara kualitatif menunjukkan bahwa penting dan signifikansinya loyalitas dalam kompetensi dan motivasi kerja untuk memelihara dan menumbuhkan semangat kerja pengurus BUMDes Camar.

Kata kunci: Kompetensi, Motivasi Kerja, Kinerja, Badan Usaha Milik Desa

Abstract

This article seeks to explain the influence of competence and work motivation on the performance of BUMDes Camar management in Parsanga Village, Sumenep City District, both partially and simultaneously. BUMDes as an organization that manages the economic growth of rural communities is expected to have good management performance in order to maximize the roles and functions of the organization. Performance is closely related to competence and work motivation. The method used is mixed, beginning with quantitative and continuing with qualitative. Quantitative data collection through questionnaires on 24 respondents. Data analysis techniques are multiple linear regression, t test and F test. The results of the competency variable t test (X_1) have a significance level of 0.011. While the t count value is 2.809 and t table is 2.080 ($2.809 > 2.080$), meaning that it has a significant effect. The results of the t-test for the variable work motivation (X_2) show a significance level of 0.001. Meanwhile, the t count is 4.063 and the t table is 2.080 ($4.063 > 2.080$), meaning that it has a significant effect. F test results show a significance level of 0.000. While the value of F count is 18.175 and F table 3.44 ($18.175 > 3.44$) means that competence and work motivation simultaneously have a positive and significant effect on performance. The coefficient of determination (R^2) of 0.634 means that performance is influenced by competence and work motivation by 63.4%, the remaining 36.6% is influenced by other variables not examined in this study. Then qualitatively it shows that the importance and significance of loyalty in competence and work motivation is to maintain and foster the work enthusiasm of Camar BUMDes management.

Keywords: Competence, Work Motivation, Performance, Village Owned Enterprises

Pendahuluan

Setiap organisasi dituntut memiliki daya saing agar dapat bertahan dari kompetisi yang semakin keras. Organisasi usaha publik dilingkup Desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tujuan memberdayakan masyarakat dan membangun desa melalui peningkatan penghasilan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengacu pada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang desa Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa BUMDes lembaga perekonomian Desa yang memiliki peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat Desa dan membantu pertumbuhan APBDes. Maka dari itu pengelolaan BUMDes yang profesional sangat strategis untuk menjaga peran ideal BUMDes yang kontribusi dan keberadaannya nyata (Ridlwani, 2015). BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Badaruddin et al., 2018)

Pada hakikatnya BUMDes bukan merupakan hal yang baru. BUMDes telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait desa atau pemerintah daerah sebelum UU Desa terbit pada tahun 2014. BUMDes telah dahulu diatur dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yakni desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Syafrizal et al., 2020). Keberadaan BUMDes yang resmi dan berbadan hukum di seluruh Indonesia sesuai dengan informasi di Kemendes yaitu berjumlah 7.902 per tanggal 21 Juli 2022 (<https://bumdes.kemendes.go.id/>). Maka jika dibandingkan dengan persentasi jumlah desa 74.961 yaitu sekitar 10,55%. Keberadaan BUMDes ini sebagai ujung tombak penggerak ekonomi desa yang bersama sama dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk kepentingan desa (Faedlulloh, 2018).

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai macam jenis potensi terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi (Sinaga & Sirait, 2020). Selain pengembangan usaha ekonomi, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada. Pembentukan BUMDes juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di perdesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat (Darmawan et al., 2022).

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabel, pertanggung jawaban dan kewajaran, dengan mekanisme keanggotaan dasar yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Maka dari itu, desa harus menggali potensinya melalui pemilihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sehingga mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di desa, yang nantinya diharapkan dapat membawa pengaruh positif dalam kinerja dan produktivitas anggotanya. Selain itu diharapkan dapat membuat BUMDes tidak hanya mampu menghidupi masyarakat desa dimana lembaga ini berada, namun lebih luas lagi juga bisa menularkan manfaatnya ke wilayah lain dalam skala yang lebih besar (Mayarni et al., 2020).

Keberadaan BUMDes terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Keberadaan BUMDes pada perkembangannya terklarifikasi menjadi 4 kategori yaitu kategori dasar, tumbuh, berkembang dan maju. Kabupaten Sumenep menjadi salah satu contoh perkembangan dan pengelolaan BUMDes. Di Kabupaten Sumenep termasuk dalam kategori dasar, yaitu sebanyak 174 desa dan kategori tumbuh sebanyak 97 desa. Hanya terdapat 10 desa yang masuk dalam kategori berkembang dan 1 desa masuk dalam kategori maju. Dari keempat Desa tersebut salah satunya adalah Desa Parsanga (Kabar Madura, <https://kabarmadura.id> diakses 13-01-2022).

Desa Parsanga merupakan salah satu desa di Kecamatan Kota Sumenep yang telah mendirikan BUMDes yang diberi nama "BUMDes Camar". BUMDes Camar Desa Parsanga termasuk dalam kategori BUMDes berkembang. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kinerja pengurus BUMDes, karena untuk mengelola BUMDes dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan kinerja yang baik dari para pengurusnya. Kinerja adalah tingkat keberhasilan seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan (Iqbal et al., 2015).

Kinerja erat kaitannya dengan kompetensi dan motivasi kerja. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Pawirosumarto et al., 2017). Motivasi kerja adalah seperangkat kekuatan baik yang berasal dari dalam diri seseorang yang mendorong untuk memulai berperilaku kerja sesuai dengan format, arah, intensitas, dan jangka waktu tertentu (Alhusaini et al., 2022). Dengan adanya motivasi, akan mendorong pengurus untuk mengerahkan kemampuannya sehingga mampu menunjukkan kinerja yang maksimal (Anitha, 2014) sehingga dapat membentuk komitmen (Rasaili et al., 2021) dan gairah kerja seseorang untuk mampu bekerja bersama, bekerja efektif, dan terintegritas dengan segala daya upayanya mampu mencapai target dan kepuasan (Adha et al., 2019).

Berdasarkan pada gambaran di atas, maka penelitian ini berupaya untuk menjelaskan secara kuantitatif tentang pengaruh kompetensi motivasi kerja terhadap kinerja pengurus BUMDES Camar Desa Parsanga Kecamatan Kota Sumenep baik secara parsial maupun simultan. Penelitian akan dilanjutkan pada metode kualitatif yaitu diskripsi dan penjelasan tentang kinerja pengurus BUMDes Camar melalui pendalaman studi wawancara dari populasi yang diperoleh melalui metode kuantitatif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan pendekatan eksplanatori yaitu diawali dengan kuantitatif dan dilanjutkan pada metode kualitatif. Model yang digunakan dalam rangka mendeskripsikan dan menjelaskan lebih mendalam dari temuan yang dihasilkan melalui pendekatan kuantitatif. Sumber data kualitatif didasarkan pada pilihan strategis terhadap jumlah responden dari kuantitatif. Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 24 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh.

Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi dengan penggunaan bantuan *software* statistik yaitu IBM SPSS Statistics v.26. Pada metode kualitatif koleksi data secara wawancara, dokumentasi dan data sekunder. Wawancara dengan persentasi 25% dari jumlah responden, yaitu terhadap 6 informan. Dari informan-informan tersebut peneliti mengkategorikan yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci yaitu kepala desa, informan utama ketua BUMDes dan informan pendukung adalah pengurus BUMDes dan anggota BUMDes. Data dianalisis melalui pendekatan Milles dan Huberman yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan data.

Hasil

Pendekatan Kuantitatif.

Hasil dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS v.26, diperoleh hasil sebagai berikut:

Table 1. Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r _{hitung}	Pernyataan	r _{hitung}	Pernyataan	r _{hitung}	Keterangan
X1.1	0,826	X2.1	0,868	Y.1	0,601	Valid
X1.2	0,569	X2.2	0,590	Y.2	0,734	Valid
X1.3	0,688	X2.3	0,765	Y.3	0,690	Valid
X1.4	0,578	X2.4	0,868	Y.4	0,608	Valid
X1.5	0,470	X2.5	0,629	Y.5	0,675	Valid
X1.6	0,609	X2.6	0,578	Y.6	0,543	Valid
X1.7	0,578	X2.7	0,868	Y.7	0,629	Valid
X1.8	0,826	X2.8	0,590	Y.8	0,608	Valid
X1.9	0,688	X2.9	0,765	Y.9	0,734	Valid

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa uji validitas terhadap semua variabel hasilnya menunjukkan valid. Keterangan valid membuktikan bahwa variabel bisa dipakai untuk uji-uji berikutnya

dalam rangka menumukan pengaruh yang lebih akurat antara variabel kompetensi, motivasi kerja terhadap kinerja. Selanjutnya dilakukan hasil uji realibilitas sebagaimana pada tabel dibawah.

Table 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi (X ₁)	0,811	Reliabel
Motivasi Kerja (X ₂)	0,884	Reliabel
Kinerja (Y)	0,825	Reliabel

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Pada tabel 2. Yaitu hasil uji reliabilitas menerangkan semua variabel reliabel. Keterangan ini juga membuktikan ada konsistensi alat yang digunakan terhadap variabel yang di uji.

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.753	5.833		.643	.527		
	Kompetensi	.407	.145	.394	2.809	.011	.885	1.131
	Motivasi Kerja	.481	.118	.570	4.063	.001	.885	1.131

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.753	5.833		.643	.527
	Kompetensi (X ₁)	.407	.145	.394	2.809	.011
	Motivasi Kerja (X ₂)	.481	.118	.570	4.063	.001

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Tabel 5. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	160.042	2	80.021	18.175	.000 ^b
	Residual	92.458	21	4.403		
	Total	252.550	23			

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

b. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja (X₂), Kompetensi (X₁)

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.796 ^a	.634	.599	2.09827
a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kompetensi				
b. Dependent Variable: Kinerja				

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Diskusi

Berdasarkan data hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics v.26 maka didapat hasil bahwa tingkat signifikansi pada variabel kompetensi adalah sebesar $0,011 < 0,05$ yang artinya signifikan. Sedangkan nilai t_{tabel} dapat dihitung dengan $t(\alpha/2 ; n-k-1)$ sehingga diperoleh nilai $t_{hitung}(2,809) > t_{tabel}(2,080)$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang berarti kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengurus BUMDes Camar Desa Parsanga. Kompetensi merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengurus yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menentukan kualitas SDM yang dimiliki pengurus BUMDes Camar Desa Parsanga sehingga dapat menghasilkan kinerja yang tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Annisa Putri Soetrisno dan Alini Gilang (2018) yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan hasil uji t pada variabel motivasi kerja menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya berpengaruh signifikan. Sedangkan nilai t_{tabel} dapat dihitung dengan $t(\alpha/2 ; n-k-1)$ sehingga diperoleh nilai $t_{hitung}(4,063) > t_{tabel}(2,080)$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang berarti motivasi kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengurus BUMDes Camar Desa Parsanga.

Berdasarkan hasil uji F diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya signifikan. Sedangkan nilai F_{tabel} dapat dihitung dengan $F(k ; n-k)$ sehingga diperoleh nilai $F_{hitung}(18,175) > F_{tabel}(3,44)$ maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, artinya kompetensi dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengurus BUMDES CAMAR Desa Parsanga. Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa angka koefisien determinasi (R^2) variabel kompetensi dan motivasi kerja mempengaruhi variabel kinerja sebesar 0,634 atau 63,4%. Sedangkan sisanya sebesar 36,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pendekatan Kualitatif

Dalam mengembangkan BUMDes Camar Desa Parsanga secara strategis pemerintah Desa melalui Ketua BUMDes Haryono harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan kinerja dari pengurus BUMDes serta mendorong partisipasi anggota agar BUMDes dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat untuk ekonomi masyarakat. Moh. Salehoddin Kepala Desa mengatakan bahwa hal yang paling utama untuk eksistensi BUMDes dan kemanfaatannya untuk ekonomi masyarakat yaitu

komitmen dan kinerja pengurus. Jika kinerja pengurus tidak bagus apalagi hanya mementingkan kepentingan individunya bukan lembaga maka BUMDes Camar akan sama dengan BUMDes lainnya yaitu mati sore atau keberadannya tidak berguna. Olehnya Kepala Desa sangat menekankan pada kualitas dan semangat kerja pengurus (*personal communication*, 20/10/2022).

”.....pengurus jangan berfikir hasil jangka pendek, tetapi masa depan yang lebih berkembang, selain itu semangat pengabdian juga harus tertanam. Ya....insyallah pengurus dapat hasil juga lah walau tidak seberapa, tetapi nanti kalau berkembang pesat honor pengurus bisa melebihi UMR sumenep.

Dalam menjaga intensitas, efektifitas kinerja pengurus tentu selaras dengan yang disampaikan oleh Haryono sebagai ketua BUMDes Camar. Semangat kinerja pengurus harus selalu dipupuk. Kinerja sebagai ujung tombak eksistensi peran dan fungsi lembaga dan organisasi (*personal communication*, 18/10/2022). Memang kinerja menjadi faktor utama dalam bergerak dan berkembangnya organisasi tetapi kinerja pengurus perlu juga dibarengi dengan kompetensi dan motivasi kerja. Pengurus yang tidak punya kompetensi maka potensi kinerja tidak akan sesuai dengan prosedur dan sulit memahami orientasi organisasi dan harapan pemimpin. Maka dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus perlu dibekali kompetensi yang mumpuni. Selain itu motivasi kerja juga harus dijaga agar gairah kinerja pengurus tetap maksimal, efektif, ideal dan sesuai dengan target dan tujuan.

Pada kompetensi inilah di BUMDes Camar juga dilakukan. Kompetensi pengurus diawali dengan seleksi dan rekrutmen kepengurusan berdasarkan pada loyalitas dan kapabilitas pengurus. Ada banyak SDM di Desa Parsanga dari kalangan muda-mudi tetapi loyalitas dan pengabdian pada perkembangan desa tidak mudah dijumpai. Banyak pemuda-pemuda yang sudah lulus sarjana tetapi orientasi profitya sangat tinggi tidak memulai dari bawah dan pengabdian. Menurut Haryono kita memiliki pengurus yang loyalitasnya tinggi pada organisasi dan pengabdian pada ekonomi masyarakat. Dalam aspek kompetensi ini ada 4 (empat) indikator yang dikedepankan yaitu: loyalitas, *attitude*, *skill* dan *knowledge*. Keempat aspek ini sudah dimiliki sejak awal sebelum mereka bergabung menjadi bagian kepengurusan dalam BUMDes Camar. Setidaknya Kepala Desa dan Ketua BUMDes sudah memiliki pandangan terhadap calon pengurus melalui empat indikator tersebut.

Kemudian pengurus BUMDes juga terus dijaga kompetensinya melalui pelatihan *soft skill* maupun *hard skill*. Posisi Desa Parsanga dengan Kota Sumenep yang tidak terlalu jauh memudahkan intensitas dan keaktifan pengurus dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas terkait di Kabupaten Sumenep. Kami sering mendorong agar pengurus aktif mengikuti pelatihan pengembangan *skill* dan kemampuan di Kabupaten untuk dapat diterapkan di Desa dan bermanfaat untuk kemajuan organisasi (Moh. Salehoddin, *personal communication*, 20/10/2022). Pelatihan secara langsung dapat menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman pengurus, secara tidak langsung juga membentuk loyalitas pada organisasi dan sikap di internal kepengurusan maupun pada anggota. Selain pelatihan intensitas kordinasi dan forum – forum informal selalu dilakukan untuk menumbuhkan *skill* dan tukar pengetahuan.

Selain itu, terdapat Motivasi kerja yang menjadi bagian penting pendorong kualitas kinerja pengurus. Motivasi ini dapat dilakukan bahkan terus dipelihara oleh Ketua BUMdes Camar dan Kepala Desa Parsanga melalui dua pendekatan, yaitu: tampak dan abstrak. Motivasi yang tampak nyata dilakukan seperti pemberian honor, reward dan THR pada pengurus. Wujud itu terus dilakukan walaupun nilainya tidak seberapa. Menurut Haryono bentuk motivasi berupa uang jangan dilihat nominalnya tetapi perhatian dan kepeduliannya.

“.....saya sebagai ketua BUMDes bahkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada saya langsung dan juga secara umum kepada pengurus bahwa ketua BUMDes dan Kepala Desa tidak akan mengambil hasil keringat dari pengurus untuk keuntungan Ketua apalagi Kepala Desa, kami akan memberika reward tetapi sekecil apapun itu karena kemampuan organisasi bukan karena diambil oleh Ketua apalagi Kepala Desa”.

Sebetulnya yang terpenting itu adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan dan transparansi bantuan atau subsidi ADD terhadap keuangan BUMDes. Jika transparansi itu dijaga maka pengurus akan tetap termotivasi apalagi terdapat intensitas honor, reward dan THR terhadap pengurus. Secara kelembagaan hanya BUMDes yang sudah maju dan berkembang yang bisa melakukan itu.

Namun demikian, tentu dalam menjaga motivasi kerja tidak hanya mengandalkan indikator yang terwujud, terdapat motivasi kerja yang bentuknya abstrak dan samar samar. Dalam hal ini sering dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa tidak sungkan sungkan sering memberikan motivasi, arahan bahkan apresiasi melalui komunikasi yang dinamis dan tergugah terhadap semua pengurus utamanya pengurus inti seperti Ketua, Sekretaris dan Bendahara. BUMDes Camar bergerak pada simpan pinjam, ketika ada penambahan modal dan pengelolaan yang akuntabel maka selalu mengapresiasi dengan perkataan dan komunikasi sanjungan. Demikian pada aspek aspek lainnya. Sebaliknya juga jika ada kelambanan pekerjaan dan penyelesaian program maka kepala desa tetap sebagai *leading* sektor memberikan evaluasi pembelajaran bukan menyalahkan. Demikian juga yang dilakukan oleh Ketua BUMDes, Haryono. Pola komunikasi yang interaktif, deleberatif ini dalam rangka memupuk dan menjaga motivasi dan *sense of bilonging* pengurus baik pada lembaga maupun tugas dan pekerjaannya. Olehnya walaupun sampai saat ini BUMDes tidak terlalu berkembang pesat harapan besar ketika motivasi tetap dijaga ada potensi untuk menjadi BUMDes yang maju dan menjadi percontaan.

Jika melihat dari pola kompetensi, motivasi kerja dan kinerja pengurus BUMDes Camar secara umum sudah maksimal dan ideal. Selebihnya nanti hanya melihat hasil kinerja dan perkembangan BUMDes. Namun tentu dalam melengkapi sistem organisasi yang maju dan berkembang pengelolaan BUMDes Camar belum maksimal dalam hal evaluasi kinerja. Ketua BUMDes maupun kepala desa yang posisinya sebagai pengawas tidak secara akuntabel dan intensif melakukan pengawasan dan audit pada kinerja pengurus. Kondisi ini dalam model kerja bottom up dan delebarif mungkin lebih realistis tetapi sebagai BUMDes yang masih menuju berkembang dan maju model evaluasi yang konferensif perlu dilakukan. Kepercayaan bukan membiarkan kinerja pengurus tetapi tolak ukur kinerja dan capain yang jelas dan terstruktur.

Selain pada evaluasi kinerja, terdapat pola kerja yang tidak banyak disentuh oleh pengurus dan ditekankan oleh Ketua BUMDes yaitu basis kinerja dan pengembangan BUMDes melalui kecakapan teknologi. Hal yang paling sederhana yaitu produksi masyarakat tidak dikelola oleh BUMDes dalam aspek pemasaran e-commers. BUMDes Camar belum memiliki produk unggul tetapi bisa memanfaatkan produk rumahan masyarakat dengan membantu melakukan pemasaran berbasis digital. Selain itu layanan dan informasi tidak maksimal melalui digitalisasi, dimana digitalisasi hari ini sudah menjadi roh dari setiap organisasi seiring munculnya revolusi industri 5.0 dan society 4.0.

Preposisi hasil Kuantitatif dan Kualitatif

Sebagaimana dalam penjelasan kuantitatif di atas dua variabel X memiliki yaitu kompetensi dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai signifikansi yang berbeda. Namun pengaruh yang signifikan menunjukkan ada keterkaitan dan pengaruh yang penting diperhatikan dalam memelihara dan menumbuhkan kinerja pegawai BUMDes Camar. Hasil kuantitatif ini mencoba didalami melalui kualitatif. Dalam hasil kualitatif kompetensi dan motivasi kerja menjadi indikator dan strategi yang memang selalu ditekankan oleh Kepala Desa Parsanga dan Ketua BUMDes Camar. Upaya meningkatkan kompetensi dan motivasi karena dianggap penting dalam memacu kinerja pegawai. Sehingga dalam dua model ini ditemukan ada kesamaan hasil tentang pentingnya kompetensi dan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai.

Pada hasil kualitatif memiliki kelebihan yang belum diungkap dari temuan kuantitatif yaitu alasan pentingnya menjaga kompetensi dan motivasi kerja dari pengurus BUMDes. Alasan inilah

dalam rangka memperdalam temuan dari hasil kuantitatif yang tidak hanya melihat signifikansi pengaruh antar variabel.

Selain itu ada indikator indikator yang tidak sama diantara variabel kompetensi. Jika dalam kuantitatif variabel kompetensi memiliki indikator pengalaman, maka dalam hasil wawancara pengalaman untuk menjadi pengurus tidak terlalu ditekankan dan diperhatikan sebagai kompetensi seseorang. Justru yang paling ditekankan adalah loyalitas dan kerjasama. Loyalitas menjadi aspek penting yang dinilai sebagai kompetensi yang mampu meningkatkan kinerja pada pengelolaan BUMDes Camar. Bagi kepala Desa, pengurus sejak awal ditumbuhkan semangat loyalitas dan kerja sama. Loyalitas pada organisasi dan nilai pengabdian pada masyarakat. Karena BUMDes Camar baru beranjak untuk menjadi BUMDes berkembang, maka yang sangat dibutuhkan adalah loyalitas pengurus. Pengurus tidak selalu berorientasi profit tetapi nilai pengabdian pada desa. Bahkan kompetensi dan motivasi kerja dalam substansi memiliki nilai kesungguhan pengurus dalam mengelola organisasi BUMDes Camar untuk kepentingan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu yang bisa diketengahkan sebagai preposisi dari hasil penelitian ini adalah penting dan signifikansinya loyalitas dalam kompetensi dan motivasi kerja untuk memelihara dan menumbuhkan semangat kerja pengurus BUMDes Camar.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics v.26, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi (X_1) berpengaruh secara signifikan sebesar 0,407 terhadap kinerja (Y). Variabel X_1 mempunyai $t_{hitung} 2,809 > t_{tabel} 2,080$. Maka, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang berarti kompetensi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pengurus BUMDes Camar Desa Parsanga.
2. Motivasi kerja (X_2) berpengaruh signifikan sebesar 0,481 terhadap kinerja (Y). Variabel X_2 mempunyai $t_{hitung} 4,063 > t_{tabel} 2,080$. Maka, dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang berarti motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pengurus BUMDes Camar Desa Parsanga.
3. Berdasarkan pengujian secara simultan diperoleh $F_{hitung} (18,175) > F_{tabel} (3,44)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima yang berarti terdapat pengaruh kompetensi dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja Pengurus BUMDes Camar Desa Parsanga.

Kompetensi dan motivasi kerja menjadi bagian penting dan strategis untuk mendorong kinerja pengurus BUMDes yang berkualitas, akuntabel, efektif dan tercapainya tujuan. Kompetensi dimiliki sejak awal oleh pengurus dan terus dikembangkan ketika menjadi bagian dalam organisasi BUMDes Camar seperti pelatihan dan studi banding. Kemudian internalitas motivasi kerja menjadi peran dan tanggung jawab *leading* sektor yaitu kepala desa dan ketua BUMDes. Model motivasi ada yang nyata dan samar-samar. Yang nyata berupa pemberian uang dan barang, yang samar berupa apresiasi dan komunikasi visioner.

Saran dan rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dari kesimpulan dan data di atas, maka berikut ini adalah saran dari peneliti:

1. Pengurus BUMDes harus meningkatkan kompetensi dengan cara meningkatkan keterampilan serta sikap tanggap dan rajin agar mampu menyelesaikan tugas dengan baik.
2. BUMDes Camar Desa Parsanga sebaiknya meningkatkan motivasi kerja mandiri dengan memahami orientasi organisasi dan mimpi BUMDes agar tidak selalu tergantung pada motivasi yang dilakukan oleh Ketua dan Kepala Desa
3. BUMDes Camar sebaiknya terus mengasah kompetensinya melalui perkembangan dan informasi media dan teknologi. Jangan selalu bergantung pada pelatihan. Ada banyak pengetahuan yang bisa diakses melalui media teknologi yang bisa menambah pengetahuan dan bisa diimplementasikan di wilayah kerja.

Daftar Pustaka

- Adha, R. N., Qomariah, N., & Hafidzi, A. H. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v4i1.2109>
- Alhusaini, A., Kristiawan, M., & Eddy, S. (2022). Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/10.55208/aj.v2i1.27>
- Anitha. (2014). Determinants of employee engagement and their impact on employee performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 63(3), 308–323. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-01-2013-0008>
- Badaruddin, D., Kariono, K., Ermansyah, D., & Sudarwati, L. (2018). *Community empowerment Based Social Capital and Village Business Company (BUMDes)*. 136(6), 181–187. <https://doi.org/10.2991/icosop-17.2018.27>
- Darmawan, A., Alamsyah, R., Koswara, R., & Ahmadi, D. (2022). *Strengthen the Role of Village Owned Enterprises (BUMDes) to Improve Social Welfare and Reduce Inequality in Rural Areas: Lesson from Indonesia. 2020, 2017–2020*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320874>
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>
- Iqbal, S, A., & N, H. (2015). Effect of Leadership Style on Employee Performance. *Arabian Journal of Business and Management Review*, 5(5), 1–6. <https://doi.org/10.4172/2223-5833.1000146>
- Mayarni, Surya Afwan, Mimin Sundari Nasution, & Zulkarnaini. (2020). Community Empowerment: The Need for a Bumdes Strategy in Improving Welfare. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 7(4), 375–382. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v7i4.135>
- Pawirosumarto, S., Sarjana, P. K., & Muchtar, M. (2017). Factors affecting employee performance of PT.Kiyokuni Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 59(4), 602–614. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2016-0031>
- Rasaili, W., Dafik, D., Hidayat, R., & Prayitno, H. (2021). *Analysis of the Influence of Local Politics on Implementation SDGs 4 Policy for Quality Education*. 4(4), 196–204. <https://doi.org/10.18421/SAR44>
- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Sinaga, K., & Sirait, S. (2020). Effective BUMDes Management Strategies to Improve Village Economy in Naga Dolok Village, Simalungun Regency. *Jurnal Mantik*, 4(3), 2218–2224.
- Syafrizal, Hajar, S., & Kholik, K. (2020). Strengthening BUMDES Management Through MSMEs in Increasing Village Income. *Abdimas Umtas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM-Universitas*, 2018(December 2015).

Analisis Dimensi Dan Peran Aktor *Sound Governance* dalam Kerja Sama *Sister City* Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool (Studi Kasus Pengiriman Sepuluh Pesepakbola Muda Berbakat)

Dzakiyah Adalatul Hikmah^{1*}, Khusnul Prasetyo², Aditama Azmy Musaddad³, Eka Arum Pramestya⁴, Ika Devi Lestari⁵

^{1,2}Universitas Gadjah Mada, Indonesia

^{3,4,5} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author: khusnulprasetyo4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi dan aktor sound governance dalam kerja sama sister city antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool di bidang olahraga dalam rangka mengoptimalkan potensi anak muda Kota Surabaya dengan mengirimkan sepuluh (10) pemuda berbakat ke Liverpool. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, hingga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh dimensi sound governance yang ada, Kota Surabaya dan Kota Liverpool mampu membuktikan keseriusannya sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah diterjemahkan ke dalam Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU). Selain itu, keempat aktor sound governance yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, dan internasional telah menunjukkan kerja sama dan peran aktif mereka meskipun ada beberapa aspek yang belum bisa dioptimalkan secara penuh.

Kata kunci: sound governance, sister city, sepak bola, kota Surabaya, kota Liverpool.

Abstract

This study aims to analyze the dimensions and actors of sound governance in sister city cooperation between the City Government of Surabaya and City Government of Liverpool in the field of sports in order to optimize the potential of Surabaya City youth by sending ten (10) talented youths to Liverpool. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, literature studies, to documentation. The results showed that of the ten existing sound governance dimensions, the City of Surabaya and the City of Liverpool were able to prove their seriousness in accordance with the cooperation contract that had been translated into a Letter of Intent (LoI) and a Memorandum of Understanding (MoU). In addition, the four sound governance actors, namely the government, the public, the private sector, and the international community, have shown their cooperation and active role although there are several aspects that have not been fully optimized.

Keywords: sound governance; sister city; football; city of Surabaya; city of Liverpool.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya. Dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki keleluasaan gerak dalam mengembangkan potensi daerahnya. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memiliki implikasi untuk perubahan dalam bentuk hubungan antar pemerintah. Implikasi dari perubahan-perubahan itu adalah hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan di antara pemerintah daerah (Pratikno, 2007 dalam Firdaus, 2016).

Guna terlaksananya tata kelola pemerintah daerah yang baik, idealnya diperlukan kerja sama atau kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan *stakeholders* daerah masing-masing. Tata kelola yang baik membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sipil (Farazmand, 2004). Lebih lanjut, pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan *stakeholders* luar negeri untuk memajukan daerahnya sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri) Bab III Pasal 3 mengenai Bentuk Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri berbentuk: a. kerja sama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”; b. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan; c. kerja sama penyertaan modal; dan d. kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek potensi sumberdaya yang dimiliki seperti sumberdaya manusia, sehingga dengan memberdayakan masyarakat dapat menjadi keuntungan yang luar biasa bagi suatu daerah.

Konsep hubungan kemitraan antar kota mulai berkembang pada tahun 1960-an. Perkembangan hubungan kerja sama antar kota/antar provinsi lebih dikenal dengan sebutan *sister city/sister province* diikuti pula dengan meluasnya konsep hubungan kerja sama luar negeri antar pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai terminologi yang digunakan di berbagai belahan dunia sebagaimana uraian sebelumnya, seperti istilah yang digunakan Perancis (*Jumelage*), Amerika Serikat, Mexico (*Sister City*), Rusia dan Inggris (*Twin Cities*), Jepang dan Cina (*Friendship City*), Jerman (*Partnerstadt*). Adapun semua istilah tadi menggambarkan konsep yang sama tentang kerja sama dua kota sebagai suatu komunitas secara internasional. Kerja sama dalam pembangunan adalah kunci untuk perubahan saat ini dalam tata kelola dan sistem manajemen (Sangkala, 2011).

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah salah satu pelaku hubungan luar negeri. Potensi hubungan internasional dapat dimanfaatkan pemerintah daerah mengingat landasan hukum yang diperlukan telah ada. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kerja sama *sister city* tersebut tidak hanya antar daerah dalam negeri saja melainkan juga bisa dilakukan dengan daerah di manca negara. Potensi keberhasilan implementasi kebijakan diyakini akan lebih baik dalam kemitraan empat elemen *sound governance* dibandingkan dengan single agent (*government*). (Tjahjanulin, 2011:18-23), *sound governance* memiliki banyak dimensi. Setiap dimensi ini bekerja sama dengan lainnya seperti orkestra, dengan *leadership* yang jelas dan partisipatif dinamis elemen atau komponen interaktif, sehingga memberikan kualitas sistem governance di luar harapan.

Secara umum, konsep kerja sama *sister city* merupakan kerja sama yang diselenggarakan antara kedua kota yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di 2 kota tersebut (Damayanti, 2018). Artinya, bahwa kerja sama ini bertujuan dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah. Selain itu dalam menjalin hubungan ini, terdapat sejumlah keuntungan dari kerja sama *sister city*, diantaranya adalah: (1) kesempatan untuk *transfer knowledge* dan *experience* dalam mengelola pembangunan terhadap bidang yang dikerja samakan; (2) mendorong munculnya ide dan peran aktif pemerintah daerah kota serta *stakeholders* lainnya; (3) Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak; (4) sebagai kesempatan *transfer culture* untuk memperkaya kebudayaan daerah (Nuralam, 2018).

Pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerapkan *sister city* diantaranya adalah kota Bandung yang memulainya pada tahun 1960, yaitu kerja sama *sister city* yang terjalin dengan Kota Braunschweig, Jerman. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk kerja sama tertua di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, Kota Bandung juga menjalin kerja sama *sister city* dengan beberapa kota lain di dunia diantaranya Fort Worth, Amerika Serikat, Suwon, Korea Selatan, Liuzhou, RRC, Petaling Jaya, Malaysia dan masih banyak lagi (Bagian Kerja sama Kota Bandung, 2022). Selain kota Bandung, bergeser ke wilayah tetangga sebelah barat yaitu DKI Jakarta menurut Firmansyah (2017) juga menerapkan bentuk kerja sama *sister city* dengan Seoul, Korea Selatan di bidang perkotaan dan infrastruktur. Kemudian kota Berlin, Jerman sejak 25 tahun yang lalu mengenai infrastruktur seperti fasilitas mobilitas penduduk, jalan, alat transportasi (Muhamad Rizky, 2019), dan kerja sama dengan Hanoi, Vietnam sejak 2004 di bidang manajemen dan tata kelola perkotaan (Ruslan Burhani, 2018).

Industri olahraga merupakan penyediaan produk berupa hiburan yang dikemas untuk memuaskan dalam kebutuhan masyarakat. Apalagi dengan adanya olahraga khususnya sepak bola berkembang menjadi suatu olahraga dengan tingkat fanatisme yang sangat luar biasa. Adapun

pernyataan tersebut saat ini memiliki potensi nilai yang besar untuk berkembang sebab jumlah peminatnya yang sangat luas. Peluang tersebut tentu harus dimanfaatkan oleh seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan sepak bola di Indonesia. Dalam hal ini yaitu PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) selaku pemegang kebijakan diharapkan selalu berkoordinasi dengan pemerintah dalam meng-optimalkan potensi sepak bola khususnya pembinaan usia muda. Hal tersebut tertuang dalam (Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional) pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.

Kota Surabaya juga menjadi salah satu kota *sister city* di Indonesia yang bekerja sama serta berkolaborasi dengan berbagai negara Internasional di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial-budaya, olahraga, tata perkotaan dan lain-lain. Kerja sama Kota Surabaya sebagai *sister city* melakukan kerja sama dengan Kota Liverpool, hal itu dibuktikan melalui MoU yang ditandatangani secara langsung oleh Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Liverpool pada tanggal 19 Maret 2018, dengan bidang kerja sama meliputi pengembangan ekonomi kreatif, manajemen pelabuhan, pengembangan kota pintar (*smart city*), dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (Bagian Administrasi Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya, 2018) kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool yang menghasilkan lima kontrak kesepakatan di bidang pembangunan kualitas dan kapasitas SDM (pendidikan), seni (musik dan film), perdagangan, industri ekonomi kreatif, dan olahraga (Efendi, 2017).

Dalam kerja sama di berbagai bidang ini beberapa kota di Indonesia lainnya juga telah menjalani kerja sama Internasional dalam bentuk *sister city* seperti halnya Kota Bandung bekerja sama bidang ekonomi kreatif dengan negara Jerman di Kota *Brauschweig*, Kota Ambon dengan salah satu kota India dalam seni musik. Namun dalam kerja sama *sister city*, Khusus dalam olahraga sepak bola, patut kita garis bawahi adalah kerja sama ini dilakukan oleh *stakeholders* 'pemerintah daerah' bukan klub sepak bola. Karena di Indonesia, kerja sama dalam bidang sepak bola identik dilakukan oleh sebuah klub atau pemerintah yang mengasosiasi persepakbolaan yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ditegaskannya lagi, antara kota Surabaya dengan kota Liverpool dalam hal persepakbolaan menjadi sorotan di tengah masyarakat karena di daerah lain belum pernah dilaksanakan oleh 'pemerintah kota' manapun di Indonesia, yang ada hanyalah kerja sama yang dilakukan oleh 'pihak klub itu sendiri'. Hal itu dibuktikan dengan temuan-temuan dalam jurnal (Pratiwi, 2019) seperti kerja sama Persib Bandung dengan Inter Milan (Italia), Bali United dengan Paris Saint-Germain (Prancis), Persija dengan Feyenoord (Belanda) Persija dengan Espanyol (Spanyol), Persija dengan Gimnasia (Argentina) lalu Korea Selatan dan pemerintah PSSI yang bekerja sama dengan Inggris (www.indosport.com). Artinya, bahwa perbedaannya adalah klub-klub ataupun pemerintah PSSI diatas bukanlah pemerintah daerah (*local government*) melainkan *private sector* sehingga hal ini terlihat unik karena kerja sama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bukanlah klub Persebaya asal Surabaya. Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti analisis dimensi dan peran aktor *sound governance* dalam kerja sama *sister city* antara pemerintah Kota Surabaya dengan Kota Liverpool.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2019) yaitu: 1) dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci; 2) peneliti kualitatif lebih bersifat deskriptif; 3) penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*; 4) penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). Dalam pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan *snowball* agar selain menysasar kepada informan tertentu, penelitian ini diharapkan mengalir untuk terus mendapatkan validasi yang peneliti lakukan melalui triangulasi (Anggito and Johan Setiawan, 2018).

Fokus penelitian ini ingin menganalisis dimensi dan peran aktor *sound governance* dalam kerja sama *sister city* antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool dalam

mengembangkan persepakbolaan di Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan selama periode bulan September hingga Desember 2019 dengan narasumber:

1. Kepala Sub Bagian Informasi Humas Pemerintah Kota Surabaya;
2. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya;
3. Sub Bidang Kerja sama Internasional, Bagian Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya;
4. Raditya Duta Mahendra, Pemain sepak bola muda Kota Surabaya yang dikirim ke Liverpool;
5. Aprillo Ferdinan Retassambery, Pemain sepak bola muda Kota Surabaya yang dikirim ke Liverpool;

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *interactive model* dari Miles et al (2014) yaitu *data collection, data condensation, data display, hingga conclusion: drawing* atau *verification*.

Hasil

Terdapat empat aktor *sound governance* dalam kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Liverpool sebagai berikut:

1. **Government (Pemerintah)**

Peran bagian kerja sama Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan kerja sama Kota Surabaya dengan Kota Liverpool dalam pengiriman 10 (sepuluh) pemain sepak bola muda berbakat dalam kerangka kerja sama *sister city* adalah dimulai dari proses pengiriman surat penawaran kerja sama dari Kota Liverpool hingga penandatanganan kerja sama yang dituangkan dalam *Letter of Intent (LoI)* dan *Memorandum of Understanding (MoU)*. Selain itu peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dan Kementerian Luar Negeri sangat penting untuk menyetujui adanya kerja sama tersebut. Kedatangan delegasi dari Kota Liverpool ke Kota Surabaya untuk melakukan kerja sama menghasilkan penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool pada tanggal 19 Maret 2018, dengan bidang kerja sama meliputi pengembangan ekonomi kreatif, manajemen pelabuhan, pengembangan kota pintar (*smart city*), dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota Surabaya untuk mengatur segala aspek perencanaan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi program. Selain itu, Dispora Kota Surabaya merupakan pelaksana teknis dalam hal pengiriman 10 (sepuluh) pemain sepak bola muda berbakat Kota Surabaya ke Kota Liverpool yang bertempat di *Tranmerre Rovers Football Club*, yaitu dengan melakukan seleksi dan memilih sebanyak 9 (Sembilan) pemain sepak bola berbakat. Serta 1 (satu) pemain lagi yaitu Mohammad Supriadi yang mendapatkan *golden ticket* dari Pemerintah Kota Surabaya karena memiliki potensi yang sudah tidak diragukan lagi.

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota Surabaya juga turut andil dalam pengiriman 10 pemain sepak bola muda berbakat yaitu dengan diselenggarakannya *press release* sebelum pemain diberangkatkan ke Kota Liverpool dan sesudah kepulangan pemain dari kota tersebut ke Indonesia. Kemudian penulisan berita melalui media sosial seperti berita, *web page*, facebook dan instagram Humas Pemerintah Kota Surabaya yakni akun Bangsa Surabaya.

2. **Private Sector (Swasta)**

Campur tangan pihak swasta hampir tidak ada di dalamnya, dikarenakan hal ini merupakan program pemerintah yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, sehingga dalam penggunaan anggaran tersebut tidak diperbolehkan adanya sponsor yang berkaitan dengan *sponsorship* di dalam proses kegiatannya. Peran swasta memang tidak banyak dan tidak berkaitan dengan persoalan finansial. Namun, peran swasta dalam hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan salah satu klub sepak bola yang ada di Kota Surabaya yaitu Persebaya FC. Persebaya FC turut berpartisipasi sebagai tim seleksi yang membantu pihak Dispora Kota Surabaya.

Persebaya Surabaya merupakan klub profesional sepak bola yang berjalan secara *independent* atau mandiri dalam pengelolaan anggaran dan dapat dikatakan sebagai *business oriented*, bahkan mampu menyumbangkan bagi APBD Kota Surabaya. Seleksi dilakukan oleh pihak Dispora melalui beberapa tahap, yang pertama adanya seleksi melalui pertandingan antar klub-klub liga yang ada di Kota Surabaya. Pada awalnya tahapan ini diketahui para klub melalui undangan yang dikirimkan oleh pemkot Surabaya yakni Dispora pada tiap-tiap klub. Setelah seleksi melalui klub, tahap selanjutnya dilakukan seleksi per individu, hingga seleksi ketiga memperoleh 30 peserta yang tersisa, dan di tahap seleksi akhir diperoleh 9 pemain sepak bola muda berbakat dan 1 pemain yang tanpa mengikuti tes yaitu Muhammad Supriyadi serta 2 orang sebagai *official*, satu orang *official* berasal dari salah satu klub sepak bola di Kota Surabaya dan satu orang *official* berasal dari perwakilan Dispora Kota Surabaya.

3. *Civil Society* (Masyarakat)

Peran aktor masyarakat, subjek atau sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool yaitu 10 pemain U-15 yang diperoleh dari proses seleksi pemain secara ketat dari 850 pelajar. Pemain-pemain selaku informan dalam penelitian ini mengetahui adanya kerja sama ini dari Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut menunjukkan adanya komunikasi internal. Berdasarkan sub aspek fokus penelitian yang telah ditentukan didapatkan temuan yaitu:

Temuan pertama, didapatkan temuan bahwa dalam proses seleksi pemain, seleksi yang dilakukan yaitu dengan membuat suatu kegiatan pertandingan antar klub atau kompetisi internal se-Surabaya, kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga selaku pelaksana teknis. Adapun pemain yang akan dikirim ke Liverpool melalui seleksi yang cukup panjang, mulai dari tes fisik hingga tes psikotes. Adapun tim yang menyeleksi yakni pihak Dispora Kota Surabaya.

Temuan kedua, dalam aspek anggaran untuk akomodasi para pemain yang dikirim ke Liverpool telah diatur oleh kedua belah pihak yakni Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Liverpool dan tidak mendapat bantuan dana dari pihak swasta. Selama di Kota Liverpool para pemain ditemani seorang pelatih Legenda Persebaya yaitu Yusuf Ekodono dan Edy dari Dispora Kota Surabaya serta satu orang penerjemah bahasa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas yang berlokasi di Kota Liverpool. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya secara serius dalam pembinaan usia muda. Adanya pendampingan tersebut juga memberikan dukungan secara moral terhadap pemain itu sendiri. Selain itu, selama di Kota Liverpool para pemain diterima dengan baik serta mendapat fasilitas secara kompleks seperti kegiatan pelatihan, kegiatan menonton pertandingan antar klub di Inggris, jalan-jalan mengelilingi tempat-tempat bersejarah di Inggris, dan lain-lain.

Temuan ketiga, didapatkan temuan bahwa dari adanya kerja sama internasional ini, bibit-bibit pemain unggul yang telah dikirim mengalami peningkatan yang cukup drastis. Dapat dikatakan bahwa ketika pemain diberikan fasilitas, sarana prasarana yang memadai dan berkualitas tinggi, hal tersebut juga berdampak pada pemain itu sendiri seperti mental bertanding yang lebih berani, optimis dalam pengambilan keputusan, dan pola strategi permainan sepak bola khas Eropa yang tidak didapatkan di Indonesia. Selain

itu, pemain mengetahui nutrisi-nutrisi makanan yang baik untuk dikonsumsi, karena dari aspek biologis membuktikan bahwa nutrisi atau pola makan seorang pemain sepak bola profesional memiliki dampak yang cukup signifikan ketika bermain di lapangan.

Dari ketiga temuan di atas menunjukkan bahwa peran masyarakat (pesepakbola muda berbakat) lebih condong sebagai objek dari adanya kerja sama internasional tersebut. *Output* untuk pemain itu sendiri adalah memiliki pengalaman yang berdampak pada kemampuan diri dari aspek psikologis maupun biologis dan di masa yang akan datang diharapkan dapat mengharumkan cabang olahraga sepak bola di Kota Surabaya maupun Indonesia.

4. International

Pada sektor internasional analisis dari konsep *Sound Governance* yang digagas oleh Ali Farazmand (2004) terlihat bahwasanya Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak internasional yaitu Pemerintah Kota Liverpool. Ditemukan hasil penelitian bahwasanya proses alur kerja sama dari kedua pemerintah kota ini melalui hubungan diplomasi yang baik antara negara Indonesia dengan negara Inggris. Sebuah kerja sama internasional tidak akan berjalan tanpa adanya persetujuan dari pemerintah pusat, kemudian dari kedutaan besar Indonesia yang berlokasi di negara Inggris juga sangat mendukung adanya kerja sama *sister city* antar dua kota ini. Peran internasional dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Liverpool, mereka memberikan bantuan berupa fasilitas mengenai informasi dan tempat tinggal bagi pemain-pemain yang dikirim. Adapun Pemerintah Kota Liverpool turut mengajak pemain-pemain tersebut untuk *city tour* di Inggris.

Kerja sama yang dilakukan oleh Liverpool dan Surabaya tidak hanya memainkan peran kerja sama antar kota, namun juga antar negara dan lintas benua. Hal ini bermula dari pertemuan Wali Kota Surabaya dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua kerja sama antar kota ini mulai terlihat setelah Pemerintah Kota Liverpool yang ada di Inggris mengirimkan surat permohonan kerja sama dengan Kota Surabaya, dengan proses yang cukup lama dari tahun 2017 hingga 2018, MoU berhasil dibentuk dan ditandatangani oleh kedua kota tersebut. Pemerintah tingkat kota tidak dapat melakukan kerja sama internasional apabila pemerintah pusat tidak mengizinkan, karena kerja sama *sister city* dengan internasional ini bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah kota, pemerintah pusat juga turut andil, sehingga meskipun segala proses telah dilakukan pada level lokal (daerah), tanggung jawab penuh tetap berada di pemerintah pusat.

Diskusi

Kata dimensi disini penting untuk menyebut istilah ‘indikator’. Sebab sebagaimana dalam *good governance* dan konsep hegemonik lainnya, indikator keberhasilan adalah sebuah prasyarat mutlak bagi sebuah gagasan agar dapat dikatakan implementatif. Sebuah gagasan yang implementatif harus dapat diukur capaian/keberhasilan kinerjanya. Dalam perspektif *sound governance* terdapat sepuluh dimensi yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi administrasi publik. Dimensi-dimensi tersebut adalah:

1. Proses

Kerja sama antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool dalam kerangka *sister city* ini memiliki proses yang cukup panjang, berikut ini tahapan-tahapannya:

1. Surat pengajuan atau penawaran kerja sama *sister city* dari pihak Kota Liverpool kepada Kota Surabaya.
2. Kota Surabaya melalui bagian kerja sama menerima surat ajuan kerja sama *sister city*.
3. Wali Kota Surabaya sebagai pemegang otoritas politik tertinggi di Kota Surabaya berhak menyatakan menindaklanjuti atau menolak tawaran kerja sama dibantu oleh beberapa staf dari Sekretaris Daerah, Asisten dan Bagian Kerja sama untuk ditelaah

4. Apapun sikap Wali Kota Surabaya baik itu menyetujui maupun menolak tetap perlu mendisposisikannya kepada bagian kerja sama untuk dibuatkan surat tanggapan persetujuan atau penolakan dan permohonan fasilitasi penyusunan LoI (*Letter of Intent*) apabila setuju.
 5. Pengajuan Draft LoI
 6. Melakukan koordinasi dengan mitra Luar Negeri dalam hal ini adalah Liverpool untuk penyusunan draft LoI
 7. Penandatanganan LoI
 8. Berkonsultasi dan meminta persetujuan kepada DPRD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan dan penganggaran.
 9. Pembuatan surat permohonan fasilitasi rapat internal dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk penyusunan draft LoI (dengan dilampiri draft LoI)
 10. Rapat internal dengan Kementerian
 11. Penyusunan draft MoU
 12. Penandatanganan MoU
2. Struktur
- Struktur menunjukkan arah dan memandu jalannya sebuah proses. Arah dan jalan itu adalah sebuah tatanan, tatanan dalam perspektif *sound governance* merupakan keseluruhan sistem tata pemerintahan yang terbagi di masing-masing elemen. Ada beberapa struktur dalam kerja sama *Sister City* ini, diantaranya yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri adalah lembaga yang menaungi Pemkot Surabaya dalam mengimplementasikan kebijakan. Kemudian yang memprakarsai terjalannya *sister city* adalah Pemerintah Kota Surabaya melalui jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kota Surabaya memiliki bagian Administrasi Kerja sama yang mengurus kegiatan secara administrasi seperti pengurusan *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam proses pengesahan kerja sama *Sister City*. Kemudian Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran penting dalam hal publikasi dan penyelenggaraan *press release* baik sebelum keberangkatan maupun pelaksanaan kegiatan hingga kepulangan. Media publikasi yang digunakan diantaranya adalah web Pemerintah Kota Surabaya yang disebut, *facebook* Bangga Surabaya, dan *instagram* dan lain-lain yang biasa disebut Bangga Surabaya. Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga berperan sebagai pelaksana teknis yaitu sebagai penyelenggara bagi seleksi pemain sepak bola muda berbakat.
3. Kesadaran dan Nilai
- Menurut (Gidden, 1995) Nilai adalah suatu gagasan yang dimiliki seseorang, kelompok maupun organisasi mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Kota Surabaya dan Kota Liverpool telah memenuhi prasyarat tersebut. Adanya kesadaran, kesamaan nilai dan karakteristik antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool mengakibatkan kerja sama ini terbentuk. Beberapa kesamaan yang dimiliki oleh kedua kota adalah pelabuhan yang berperan penting dalam perdagangan dan arus logistik sehingga kerja sama yang disepakati yaitu dalam bidang perekonomian, kemudian kedua kota juga memiliki kesamaan suporter yang fanatik terhadap sepak bola sehingga keterikatan itu menjadi dasar kerja sama di bidang olahraga salah satunya melalui pengiriman pemain sepak bola muda berbakat Kota Surabaya ke Kota Liverpool. Dengan adanya karakteristik yang sama menyebabkan kedua kota ini bekerja sama untuk berkomitmen membawa kemajuan bagi kedua kota.
4. Konstitusi
- Konstitusi adalah dokumen penting yang mendasari adanya sebuah kebijakan, konstitusi dalam kerangka kerja sama *Sister City* antara Kota Surabaya dengan Kota

Liverpool yakni dokumen legal dan formal yang tertuang secara jelas pada *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) setelah melalui beberapa tahapan yang telah dijelaskan pada dimensi proses. Namun hal yang perlu diperhatikan sebelum penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah sesuatu yang mendasari yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan. Peraturan tersebut adalah landasan kebijakan *sister city*.

5. Organisasi dan Institusi

Organisasi dan Institusi yang terlibat dalam kerja sama pengiriman sepak bola muda berbakat ke Liverpool ini yaitu Bagian Administrasi Kerja sama, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya dan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya serta Kedutaan Besar Inggris di Surabaya. Kolaborasi antar Dinas dan Pemerintah Kota Surabaya diharapkan mampu untuk mewujudkan tujuan organisasi ataupun institusi dalam hal ini Pemkot Surabaya untuk mengembangkan bidang persepakbolaan Kota Surabaya kearah yang lebih baik lagi. Komitmen organisasi ditunjukkan oleh Dispora Kota Surabaya melalui keterlibatannya dalam proses seleksi sepuluh pesepakbola muda yang telah memenuhi persyaratan. Lebih lanjut, Bagian Humas Pemkot Surabaya juga menunjukkan komitmennya dalam hal komunikasi kepada publik melalui media massa. Tujuannya supaya publik mengetahui bahwa Pemkot Surabaya memberikan perhatian lebih terhadap persepakbolaan di kotanya. Bagian Administrasi Kerja Sama juga memiliki peranan penting untuk membantu dalam pengurusan MoU (*Memorandum of Understanding*) dan LoI (*Letter of Intent*). Program ini juga tidak akan berjalan jika tanpa adanya kontribusi dari Kedutaan Besar Inggris di Surabaya yang menjadi penghubung antara Surabaya dan Liverpool dalam proses pembentukan kerja sama.

6. Manajemen dan Performa

Manajemen dalam kebijakan pengiriman sepuluh pesepakbola muda berbakat ini terjalin sangat baik antar instansi terkait. Terbukti dengan adanya perencanaan dan persiapan yang cukup matang yaitu enam bulan sebelum proses seleksi dan pemberangkatan sepuluh pesepakbola muda tersebut. Hal lain tercermin dari performa tiap instansi dalam melaksanakan tugasnya, setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Surabaya atas kerja sama *sister city* dengan Kota Liverpool, setiap instansi yang terlibat langsung menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik. Namun dalam pengurusan administrasi oleh Bagian Administrasi Kerja sama terjadi sedikit kendala yaitu proses perizinan yang panjang dan lama. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi kendala yang berarti.

7. Kebijakan

Kerja sama pemerintah daerah dengan daerah yang berada di negara lain telah diatur secara sah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan. Berlakunya Permendagri tersebut menjadi payung hukum bagi Pemkot Surabaya untuk dapat menjalin kerja sama dengan daerah di berbagai belahan dunia. Pemberangkatan sepuluh pesepakbola muda berbakat Kota Surabaya ke Kota Liverpool ini dilandasi adanya kerja sama antar daerah bersama negara lain yang disebut sebagai 'kota kembar' atau *sister city*. Pemkot Surabaya telah menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa kota di berbagai negara di dunia seperti Korea, Jepang, dan Inggris. Di Kota Liverpool sendiri telah menyepakati beberapa kerja sama di berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang olahraga khususnya cabang olahraga sepak bola.

8. Sektor

Dimensi sektor menekankan akan pentingnya keahlian guna mendorong kemajuan. Pesepakbola muda berbakat Kota Surabaya yang diberangkatkan ke Kota Liverpool diharapkan mampu mengembangkan keahlian dan kemampuannya di bidang sepak bola. Pemerintah Kota Surabaya membutuhkan partisipasi langsung warga dalam meningkatkan performa dan kinerja organisasi publik. Dapat kita ketahui secara visual bahwa perkembangan sepak bola di Liverpool maju secara pesat. Negara Inggris, khususnya kota Liverpool telah mengukir sejarah persepakbolaan yang mendunia.

9. Faktor Internasional

Dalam tahapan formulasi kebijakan, Internasional dalam hal ini Kota Liverpool berperan menawarkan kerja sama kepada Pemkot Surabaya hingga pada tahapan persetujuan dari Wali Kota Surabaya. Pemerintah Kota Liverpool juga merumuskan beberapa agenda kegiatan yang akan dilakukan selama para pesepakbola muda berbakat dari Kota Surabaya berada di Kota Surabaya. Dalam tahapan implementasi, Kota Liverpool melalui Tranmere Rovers FC memiliki tugas untuk melatih para pesepakbola muda berbakat hingga mereka benar-benar terlatih, memperoleh *skill* dan mendapatkan pengetahuan lebih dari apa yang mereka dapatkan sebelumnya di Indonesia. Dalam tahapan evaluasi, Tranmere Rovers FC tidak lupa selalu memberikan laporan perkembangan per pemain sepakbola kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam setiap permainan yang telah dilakukan oleh pemain.

10. Etika

Kerja sama *Sister City* yang dilakukan oleh Kota Surabaya dan Kota Liverpool idealnya merupakan kerja sama yang saling menguntungkan dan perlu adanya hubungan timbal balik. Surabaya di sini diuntungkan dengan diberangkatkannya pesepakbola muda berbakat Kota Surabaya ke Kota Liverpool terlepas apa yang didapatkan oleh Kota Liverpool dari Kota Surabaya. Sepulang dari Kota Liverpool, mereka tentunya mendapatkan banyak ilmu baru yang diharapkan diimplementasikan dalam bermain bola. Harus disadari pula bahwa ada misi-misi ekonomi maupun politik dibalik kerja sama yang telah disepakati. Tetapi sebagaimana pandangan konstruktivisme bahwa segala sesuatu tidak ada yang baku. Yang dibutuhkan adalah kecerdikan kita dalam memanfaatkan peluang yang ada. Ketika Bagian Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya mendisposisikan surat kepada Wali Kota Surabaya, beliau mampu menangkap peluang dengan baik momentum penawaran kerja sama ini ditunjukkan dengan tanggapan yang penuh antusias dan semangat penuh secerca harapan.

Kesimpulan

Dari sepuluh dimensi *sound governance* yang ada, Kota Surabaya dan Kota Liverpool mampu membuktikan keseriusannya sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah diterjemahkan ke dalam *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU). Sehingga secara keseluruhan, dimensi *sound governance* benar-benar dijalankan sesuai dengan porsi dan mengupayakan semaksimal mungkin segala sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan keberhasilan program yang telah disepakati oleh kedua kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori *sound governance* diimplementasikan dengan baik dalam program pengiriman pesepakbola muda berbakat Kota Surabaya ke Kota Liverpool.

Selain itu, keempat aktor *sound governance* yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, dan internasional telah menunjukkan kerja sama dan peran aktif mereka meskipun ada beberapa aspek yang belum bisa dioptimalkan secara penuh. Pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Humas Pemkot, Dispora, maupun bagian Kerja Sama telah memberikan pelayanan secara maksimal berdasarkan kebutuhan program, yang agak disayangkan adalah peran swasta lokal, karena dukungan dana dalam bentuk sponsor tidak ada. Namun semuanya

berjalan dengan lancar berkat bantuan dari Persebaya FC dalam bentuk bantuan untuk menyeleksi calon anak muda yang diberangkatkan dan pihak Liverpool yakni Tranmere Rovers FC berupa pelatihan hingga jaminan penuh selama di Liverpool. Berkat klub sepak bola tersebut, keterlibatan swasta terasa hidup. Peran *civil society* juga terlihat pada antusiasme masyarakat melalui seleksi para bakal calon pemain muda yang dikirim ke Kota Liverpool yang diikuti hingga 850 pemuda. Sedangkan peran internasional adalah inisiator kerja sama ini, hingga menjamin kebutuhan para pesepakbola muda berbakat selama berlatih di sana.

Adapun saran untuk Pemerintah Kota Surabaya ke depannya adalah sebagai berikut: 1) Dalam kerja sama pengiriman pesepakbola muda berbakat diharapkan dapat berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi peran aktor *government, civil society, international* dan *private sector* dan memegang teguh dimensi *sound governance* sehingga dalam pengembangan pembinaan sepak bola bagi usia muda dapat berjalan dengan optimal dan progresif; 2) Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan kerja sama, tidak hanya dengan Kota Liverpool semata, namun dengan berbagai kota di dunia dalam pengiriman pesepakbola muda berbakat agar semakin banyak anak-anak muda Kota Surabaya yang berpotensi menjadi pemain pesepakbola profesional yang berkualitas dan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 3) Sepulang dari Kota Liverpool, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pendampingan, pembinaan dan pelatihan lanjutan guna memonitoring perkembangan kapasitas keahlian mereka dalam bermain sepak bola. Tentu dengan tujuan bahwa pengiriman yang dilakukan tepat sasaran, dengan melihat hasil dan dampak dari adanya pengiriman pesepakbola muda berbakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Anggito, A., & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Bagian Administrasi Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya. (2018). *Surabaya dan Liverpool Tanda Tangani Kerja sama Sister City*.
- Bagian Kerja sama Kota Bandung. (2022). *Sister City Kota Bandung*. Kerja sama.Bandung.Go.Id. <http://kerja.sama.bandung.go.id/category/sub-bagian/luar-negeri/sister-city>
- Damayanti, N. (2018). Strategi Pengembangan Kerja sama Sister City Kota Semarang, Indonesia – Brisbane, Australia. *EFFICIENT Indonesian Journal of Development Economics*, 1(1), 51–58. <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.27220>
- Efendi, Z. (2017). *Surabaya dan Liverpool Resmi Jadi Sister City*. Detiknews.
- Farazmand, A. (2004). *Sound Governance, Policy and Administrative Innovations*. Praeger Publisher.
- Firdaus, F. (2016). Sound Governance in the Development of Mamminasata Metropolitan Areas in South Sulawesi Province. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkap.9915>
- Firmansyah, T. (2017). *Anies: Jakarta dan Seoul Sudah Menjadi Sister City*. Republika.Co.
- Giddens, A. (1995). *Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third)*. SAGE Publications.
- Muhamad Rizky. (2019). *Sister City Jakarta-Berlin 25 Tahun, Anies: Semoga Ada Ide Bantu Disabilitas*. Okenews.
- Nuralam, I. P. (2018). Peran Strategis Penerapan Konsep Sister City Dalam Menciptakan Surabaya Green-City. *Journal of Applied Business Administration*, 2(1), 144–151. <https://doi.org/10.30871/jaba.v2i1.807>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan.
- Pratiwi, D. (2019). *Persija Jalin Kerja sama dengan Klub Asal Argentina* Artikel ini telah tayang di *Wartakotalive* dengan judul *Persija Jalin Kerja sama dengan Klub Asal Argentina*, <https://wartakota.tribunnews.com/2018/10/26/persija-jalin-kerja-sama-dengan-klub-asal-argentina>. Wartakotalive.Com.
- Ruslan Burhani. (2018). "Sister City" Jakarta-Hanoi berbagi pengalaman kelola perkotaan. Antaranews.Com.
- Sangkala. (2011). Praktik Good Governance dan Implikasinya terhadap Konsep dan Idiologi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Administrasi Di Negara –Negara Berkembang (Sound Governance Sebagai Antitesis Dari Good Governance). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). CV Alfabeta.
- Tjahjanulin, D. (2011). *Sound Governance*. Universitas Brawijaya Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Kinerja Pegawai Perpustakaan Sekolah dalam Peningkatan Pelayanan

Guntur Dwi Hermawan*¹, Oni Dwi Jayanti², Rofik³

Administrasi Publik, Universitas Pawyatan Daha

gunturcuberz@gmail.com¹ onisoeparno@gmail.com² rofik.ay25@gmail.com³

Abstrak

Optimalisasi layanan perpustakaan di sekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang cukup penting adalah kinerja pegawai perpustakaan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis sangat perlu untuk mencoba meneliti memecahkan permasalahan tersebut. Tujuan penelitian, yaitu: (1) mengetahui kinerja pegawai perpustakaan sekolah; dan (2) meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan sekolah melalui kinerja pegawai perpustakaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) data primer yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian dan (2) data sekunder: dokumen-dokumen; laporan-laporan; dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Adapun metode pengumpulan data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) teknik observasi; (2) interview, dan (3) penyebaran angket dan kuisisioner. Instrumen penelitian yang digunakan adalah: (1) pedoman interview; (2) catatan lapangan atau alat tulis; (3) melakukan penyebaran kuesioner pada responden yang telah ditentukan. Temuan penelitian ini adalah: (1) responsivitas pelayanan di perpustakaan sekolah masih rendah sebagaimana ditunjukkan masih adanya keluhan dari pengguna layanan terhadap penyedia layanan perpustakaan sekolah; (2) kehandalan petugas pelayanan perpuatakaan sekolah masih belum relevan, hal ini dapat dilihat masih belum lengkapnya koleksi perputakaan sekolah dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan; (3) etika pelayanan perpustakaan sekolah masih rendah dan belum sesuai dengan standar pelayanan Perpustakaan Nasional. Petugas kurang begitu menghargai dan terkesan acuh kepada pengguna, hal ini menjadikan pengguna kurang berminat datang ke perpustakaan sekolah; (4) fasilitas pelayanan perpustakaan sekolah belum menunjukkan kinerja pelayanan yang baik, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pengguna yang masih belum nyaman terhadap penataan fasilitas perpustakaan serta belum terjaganya kebersihan.

Kata Kunci: kinerja, perpustakaan, pelayanan

Abstract

Optimization of library services in schools can be caused by various factors, one factor that is quite important is the performance of library staff. Based on the problems above, the writer really needs to try to research to solve these problems. The aims of the research are: (1) to find out the performance of school librarian employees; and (2) improving the quality of school library services through the performance of library staff. The research method uses a qualitative approach and a descriptive research type. The types of data used in this research are: (1) primary data relating to the research focus and (2) secondary data: documents; reports; and archives related to research. The method of collecting research data that the authors used in this study were as follows: (1) observation techniques; (2) interviews, and (3) distribution of questionnaires and questionnaires. The research instruments used were: (1) interview guidelines; (2) field notes or stationery; (3) distributing questionnaires to predetermined respondents. The findings of this study are: (1) the responsiveness of services in the school library is still low as indicated by the persistence of complaints from service users against school library service providers; (2) the reliability of school library service officers is still not relevant, this can be seen from the incomplete collection of school libraries in meeting the needs of service users; (3) school library service ethics are still low and not in accordance with the National Library service standards. Staff lack respect and seem indifferent to users, this makes users less interested in coming to the school library; (4) school library service facilities have not shown good service performance, this can be seen by the number of users who are still not comfortable with the arrangement of library facilities and the cleanliness has not been maintained.

Keywords: performance, library, service

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan mengalami perkembangan relatif cepat. Perkembangan dalam arti perbaikan pendidikan telah lama diupayakan di Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan jaman yang mengarah pada persaingan antar negara di dunia.

Pembangunan dalam bidang pendidikan, dlam arti bahwa setiap proses pembelajaran diharapkan diperolehnya hasil yang optimal dan tujuan pembelajaran diharapkan berproses dari pembelajaran itu sendiri, karena tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia memiliki keahlian, mampu bersaing, dan berwawasan maju.

Dalam proses pembelajaran, faktor penentu keberhasilan belajar adalah individu tersebut sebagai pelaku dalam kegiatan belajar. Tanpa kesadaran, kemauan dan keterlibatan siswa, maka proses belajar tidak akan berhasil. Dalam kegiatan belajar siswa dituntut untuk memiliki sikap mandiri, artinya siswa perlu memiliki kesadaran, kemauan dan motivasi dari dalam diri siswa untuk melakukan usaha belajar.

Kemandirian belajar yang dimiliki siswa diharapkan dapat memanfaatkan waktu di sekolah maupun di rumah, buku-buku pegangan yang ditetapkan oleh guru, perpustakaan sekolah dan lain sebagainya. Kemandirian ini menekankan pada aktivitas siswa dalam belajar yang penuh tanggung jawab atas keberhasilannya dalam belajar. Adapun faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan belajar adalah mutu pendidikan di sekolah berupa kelengkapan sarana dan prasarana baik berupa gedung, maupun fasilitas kelengkapan lainnya.

Salah satu hal yang diperlukan untuk dapat meningkatkan proses belajar siswa adalah dengan adanya perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan dalam menunjang kegiatan belajar siswa. Perpustakaan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Adapun tujuan pendidikan nasional menurut sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yaitu: "Mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan ketrampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan".

Untuk itu penulis melakukan penelitian di perpustakaan SMA Pawyatan Daha Kediri untuk melihat kinerja dan pelayanan pegawai perpustakaan sekolah, apakah perpustakaan sudah memperhatikan standar kualitas bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan. Sehingga dengan informasi yang berkualitas, up to date dan pelayanan yang baik di harapkan akan menarik minat para siswa dan seluruh jajaran akademik untuk mengggunakan dan memanfaatkan perpustakaan.

Sumber daya manusia di sebuah perpustakaan adalah semua tenaga kerja atau perangkat perpustakaan yang terdiri atas pimpinan dan pejabat fungsional. Sebagai salah satu sumber kekuatan perpustakaan, maka sumber daya manusia tersebut harus dibekali dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap bekerja. Usaha untuk mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan pelayanan yang telah dicapai oleh pustakawan sangat penting karena hal ini merupakan landasan yang tepat guna melakukan usaha pelayanan jasa perpustakaan di masa yang akan datang secara bertahap, lebih khusus lagi pada kemampuan pustakawan dalam meningkatkan layanan perpustakaan yang dapat bermanfaat bagi pemustaka. Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya, perpustakaan perlu didukung tenaga pengelola untuk memberdayakan informasi yang dimiliki.

Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8 tentang perpustakaan, di perpustakaan terdapat 2 (dua) kelompok pustakawan, yaitu (1) Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sedangkan (2) Tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Dari sudut pandang manajemen salah satupenentu perpustakaan adalah sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di perpustakaan.

Perpustakaan harus melakukan perubahan dan peningkatan pelayanan kepada penggunanya. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat berlimpah dan menyeluruh. Keadaan ini yang mendorong para pustakawan, serta pelaku pemanfaat informasi atau pengguna perpustakaan berusaha keras agar mendapat perkembangan dan kecepatan kehadiran informasi yang mutakhir dan yang dibutuhkan. Layanan penelusuran informasi merupakan salah satu jasa perpustakaan yang disediakan bagi pengguna untuk menemukan informasi yang dibutuhkannya. Ciri utama kegiatan tersebut yaitu layanan yang dilakukan dengan memanfaatkan seperangkat sumber referensi atau bahan rujukan seperti: kamus, ensiklopedi, direktori, statistik bibliografi dan lain sebagainya.

Dengan demikian diharapkan kedepannya pustakawan lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat mewujudkan kinerja yang berkualitas sebagaimana diharapkan. Menurut Keban (2004:16) "Tuntutan peningkatan kualitas kinerja pustakawan tersebut merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin maju, serta perkembangan tuntutan reformasi di tanah air terutama terhadap pelaksanaan tugas aparatur negara termasuk dalam hal ini pustakawan".

Untuk mewujudkan itu seorang pustakawan harus dapat memajemen kegiatan administrasi perpustakaan. Mulai dari kegiatan pengadaan dan penyeleksian bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, serta kegiatan pelayanan. Sehingga perpustakaan tetap eksis dan memuaskan para pemustakanya.

Kurang optimalnya layanan perpustakaan di sekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang cukup penting adalah kinerja pegawai perpustakaan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis sangat perlu untuk mencoba meneliti memecahkan permasalahan tersebut. Hal ini, yang penulis ingin telusuri, untuk itu disinilah pentingnya masalah ini di angkat menjadi judul. Dalam karya ilmiah ini penulis mengemasnya dalam judul. "Kinerja Pegawai Perpustakaan Sekolah Dalam Meningkatkan Pelayanan". Agar pembahasannya teratur dan sistematis maka perlu dirumuskan beberapa permasalahan. Permasalahan besar yang menjadi fokus penulis adalah "Bagaimana Kinerja Pegawai Perpustakaan Dalam Meningkatkan Pelayanan di SMA Pawayatan Daha Kediri?"

Tujuan Penelitian, yaitu: (1) mengetahui kinerja pegawai perpustakaan sekolah; dan (2) meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan sekolah melalui kinerja pegawai perpustakaan.

Metode

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan tujuan dari penulis menggunakan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kinerja pegawai perpustakaan yang ada di SMA Pawayatan Daha Kediri dalam meningkatkan pelayanan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Penentuan lokasi penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan terhadap proses pengambilan data. Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan penelitian adalah SMA Pawayatan Daha Kediri. Waktu penelitian dimulai bulan Agustus sampai bulan Oktober tahun 2018. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena merupakan tempat dimana penulis bekerja sebagai pegawai perpustakaan sekolah, sehingga mengetahui keadaan perpustakaan sekolah dan siswa yang aktif menggunakan fasilitas perpustakaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari siswa-siswi SMA Pawayatan Daha yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian; (2) data sekunder, yaitu yang akan melengkapi serta memperkaya sumber data primer yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian. Dengan demikian yang akan dijadikan sebagai sumber data sekunder, adalah: (1) dokumen-dokumen; (2) laporan-laporan; dan (3) arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Adapun metode pengumpulan data adalah sebagai berikut: (1) teknik observasi; (2) interview,; dan (3) penyebaran angket dan kuisisioner,

Instrumen penelitian yang digunakan adalah: (1) pedoman interview; (2) catatan lapangan atau alat tulis; (3) melakukan penyebaran kuisioner pada responden yang telah ditentukan. Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif.

Mengetahui bagaimana kinerja pegawai perpustakaan yang selama ini ada pada SMA Pawyatan Daha Kediri serta wawancara dengan bagian yang terkait dan mencari kelemahan dan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan kondisi perpustakaan dan mengetahui peningkatan pelayanan perpustakaan. Membuat dokumentasi dari semua catatan yang ada.

Standar Kinerja Perpustakaan, meliputi:

1. Membangun koleksi nasional;
Dengan indikator:
 - 1) Persentase terbitan nasional yang diakuisisi Perpustakaan Nasional.
 - 2) Persentase ketersediaan judul terbitan nasional yang dibutuhkan dalam koleksi.
2. Membuat layanan yang aksesibel: Katalogisasi;
Dengan indikator:
 - 3) Persentase entri baru dalam bibliografi nasional.
 - 4) Persentase bahan pustaka langka yang aksesibel via katalog online.
3. Membuat layanan yang aksesibel: Akses cepat dan mudah;
Dengan indikator:
 - 5) Waktu median pengolahan dokumen.
 - 6) Ketepatan pengerakan.
 - 7) Waktu median temu kembali dokumen dari koleksi tertutup.
 - 8) Kecepatan pinjam antarperpustakaan.
 - 9) Akses langsung dari beranda website perpustakaan.
4. Membuat layanan yang aksesibel: Penggunaan;
Dengan indikator:
 - 10) Penggunaan publikasi luar negeri yang diakuisisi dalam 3 tahun terakhir.
 - 11) Biaya per unduh per sumber elektronik.
 - 12) Tingkat keterisian kursi.
 - 13) Kehadiran pemustaka per acara.
 - 14) Kepuasan pengguna.
5. Membuat layanan yang aksesibel: Digitalisasi;
Dengan indikator:
 - 15) Jumlah dokumen yang didigitalisasi per 1000 dokumen dalam koleksi.
 - 16) Persentase dokumen yang didigitalisasi per koleksi khusus.
 - 17) Jumlah konten yang diunduh per dokumen yang didigitalisasi.
6. Menyediakan layanan referensi;
Dengan indikator:
 - 18) Tingkat kebenaran jawaban yang diberikan.
 - 19) Kecepatan transaksi referensi.
7. Membangun potensi untuk pembangunan;
Dengan indikator:
 - 20) Persentase staf yang bertugas di layanan elektronik.
 - 21) Jumlah jam kehadiran dalam kegiatan pelatihan resmi per staf.
 - 22) Persentase sarana yang diterima dari hibah khusus atau usaha komersil.
 - 23) Persentase staf yang terlibat dalam kerjasama/proyek nasional dan internasional.
8. Pelestarian koleksi; dan
Dengan indikator:
 - 24) Persentase koleksi yang dalam kondisi stabil.
 - 25) Persentase semua bahan pustaka yang memerlukan penanganan konservasi/restorasi yang telah menerima penanganan.
 - 26) Persentase ruang penyimpanan yang
 - 27) memiliki lingkungan yang sesuai.
9. Pengelolaan yang efisien.

Dengan indikator:

- 28)Biaya staf per judul yang dikatalog.
- 29)Biaya staf per peminjaman.
- 30)Produktivitas staf dalam pengolahan media.
- 31)Produktivitas staf dalam layanan

Hasil

Perpustakaan SMA Pawyatan Daha Kediri adalah perpustakaan yang telah berdiri sejak tahun 2000 perpustakaan ini dibangun atas dasar menumbuhkan semangat belajar dan sebagai pusat menambah ilmu pengetahuan dan membentuk siswa agar belajar mandiri. Serta mewujudkan siswanya yang senantiasa menambah ilmunya dan meningkatkan sumber daya manusia. Perpustakaan SMA Pawyatan Daha Kediri di bangun atas dasar unggul dalam prestasi, bersahaja dan memiliki akhlak mulia, serta paripurna dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dasar.

Pendidikan atau pelatihan di bidang ilmu perpustakaan yang pernah diikuti Kepala Perpustakaan, yaitu: (1) pelatihan teknis perpustakaan di Perpustakaan Nasional tahun 2006 dan (2) pelatihan Pengolahan perpustakaan di perpustakaan Nasional tahun 2008.

Secara status kepegawaian, kelima staf perpustakaan tersebut bukanlah pustakawan, akan tetapi tenaga guru, staf tata usaha, dan pembantu pelaksana sekolah yang difungsikan sebagai tenaga perpustakaan. Lokasi perpustakaan yang baik adalah yang berada di pusat gedung sekolah sehingga mudah dicapai oleh murid dan guru. Tempatnya tenang sehingga para pengunjung tidak terganggu. Selain itu perpustakaan sekolah hendaknya berlokasi dekat dengan pusat kegiatan belajar mengajar yang memiliki lampu penerangan, pintu dan pengaturan temperature dan kelembaban yang baik sehingga menimbulkan rasa nyaman.

Perpustakaan SMA Pawyatan Daha Kediri tidak memiliki gedung tersendiri, tetapi lokasinya menempati salah satu ruangan. Ruang tersebut sebenarnya merupakan salah satu kelas, yang dialih fungsikan menjadi ruang perpustakaan. Adapun luas ruang perpustakaan seluruhnya sama dengan sebuah ruangan yang umumnya digunakan untuk kelas yaitu sekitar 5 x 7 m² (35 m²).

Sebagaimana ruang kelas lainnya, ruang perpustakaan memiliki bagian- bagian khusus untuk keperluan yang memiliki spesifikasi. Desain ruang dilakukan dengan meletakan rak-rak buku, dan dilengkapi dengan meja kerja staf. Tidak ada desain khusus untuk keperluan pelayanan teknis maupun layanan pemakai, ruang ini juga terdapat ruang baca. Ruang perpustakaan ini dilengkapi dengan layanan audio visual melalui televisi untuk mendukung pembelajaran siswa.

Koleksi perpustakaan sekolah haruslah menunjang kurikulum sekolah, sehingga dapat memberikan keterangan yang lebih luas dan dari apa yang dipelajari anak di kelas. Koleksi merupakan bagian penting dalam pelayanan perpustakaan sekolah. Koleksi merupakan bagian dari sumber belajar yang diharapkan dapat membantu para siswa dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran.

- a. Koleksi buku ajar atau paket, yaitu koleksi buku yang berjenis buku ajar buku ini adalah diperoleh melalui Departemen Pendidikan Nasional dan diperoleh dari dana BOS dan BOP.
- b. Koleksi Fiksi, yaitu jenis koleksi yang mengandung cerita rekaan (imajinasi) dan tidak nyata. Koleksi fiksi tersebut diantaranya adalah berupa cerita anak, novel, komik, cerita rakyat, cerita bergambar dan lain sebagainya.
- c. Koleksi referensi, yaitu koleksi referensi yang disesuaikan dengan tingkatan pendidikan siswa, diantaranya adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.
- d. Kliping karya siswa, koleksi kliping ini merupakan karya siswa sebagai hasil dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru pada bidang studi tertentu.

Pengadaan bahan pustaka yang menunjang kurikulum diharapkan para siswa mendapat kesempatan untuk mempertinggi daya serap dan penalaran dalam proses pendidikan, sedangkan kepada guru diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuannya dalam kegiatan mengajar, dengan sekaligus dari perpustakaan itu mereka memperoleh hiburan yang sehat. Pengadaan bahan pustaka SMA Pawyatan Daha Kediri dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- a. Untuk pengadaan koleksi bahan pustaka perpustakaan SMA Pawyatan Daha Kediri mendapatkan bantuan dari Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kota Kediri, dan Yayasan Pawyatan Daha Kediri, berupa buku paket atau buku pelajaran.
- b. Tidak semua perpustakaan mempunyai anggaran yang cukup untuk melakukan pembelian bahan pustakanya. Oleh karena itu selain mendapat bantuan buku paket atau buku pelajaran dari Departemen Pendidikan Nasional, Dinas

Pendidikan Kota Kediri dan Yayasan Pawyatan Daha Kediri. Perpustakaan SMA Pawyatan Daha Kediri mendapatkan sumbangan dari siswa untuk melengkapi koleksi yang sudah ada.

Selain itu adanya peraturan atau tata tertib Perpustakaan di SMA Pawyatan Daha Kediri merupakan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung perpustakaan. Agar perpustakaan tertib dan teratur yang akan menciptakan kenyamanan bagi pengunjung perpustakaan sekolah itu sendiri.

Peraturan atau tata tertib Perpustakaan SMA Pawyatan Daha Kediri:

1. Untuk sementara yang dapat disediakan oleh perpustakaan SMA Pawyatan Daha Kediri ialah:
 - a. Majalah dan koran
 - b. Buku-buku novel
 - c. Buku-buku sumber
2. Mengingat jumlah yang belum mencukupi peminjam diatur sebagai berikut:
 - a. Majalah dan koran disediakan dan dibaca di ruang perpustakaan dan tidak boleh dibawa pulang
 - b. Buku-buku novel disediakan khusus bagi kelas 1 dan 2
 - c. Buku-buku sumber terdiri atas dua jenis:
 - 1) Buku-buku jenis A khusus untuk guru / karyawan dan tidak boleh dibawa pulang
 - 2) Buku sumber jenis B disediakan baik untuk guru / karyawan maupun murid boleh dibaca di ruang perpustakaan maupun dibawa pulang
3. Jangka waktu untuk peminjam novel tiga hari dengan dibebani sewa buku sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah). Peminjam buku yang melebihi tiga hari dibebani denda sebesar Rp. 100,00 sehari
4. Jangka waktu peminjam buku sumber enam hari dengan dibebani sewa sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
5. Setiap peminjam baik guru / kareyawan maupun siswa berkewajiban memelihara buku-buku, majalah tersebut sebaik baiknya
Tidak dibenarkan meminjam buku-buku perpustakaan kepada siapapun di luar SMA Pawyatan Daha Kediri
6. Waktu peminjaman, setiap hari kerja antara jam 08.00 s/d 12.00
7. Pelaksanaan peminjaman
 - a. Setiap peminjam bebas memilih buku yang ingin dipinjam
 - b. Peminjam mengisi blangko yang disediakan dan menyerahkan kepada petugas
8. Peraturan tata tertib ini berlaku mulai di umumkan
9. Bagi para peminjam diharap memelihara buku pinjaman tersebut apabila buku- buku yang dipinjam ternyata rusak / hilang para peminjam wajib menggantinya

Sarana perabot perpustakaan yang dimiliki oleh perpustakaan SMA Pawyatan Daha ini ada berbagai macam dalam meningkatkan dan memudahkan petugas dalam bertugas disetiap tugas yang diberikan. Sarana dan prasarana perpustakaan sekolah ini juga diharapkan dapat membantu siswa yang berkunjung diperpustakaan.

Memiliki persentase pengunjung yang tinggi dari para siswa tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi petugas perpustakaan sekolah, artinya perpustakaan sekolah tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh siswa untuk mencari tahu informasi yang mereka butuhkan. Berikut ini data pengunjung perpustakaan dalam satu bulan.

Penilaian kinerja pelayanan perpustakaan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena kinerja dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai misinya.

Perpustakaan sekolah sebagai salah satu lembaga pelayanan sekolah di era reformasi ini dituntut untuk memberikan kinerja yang optimal guna memenuhi kebutuhan siswa. Dengan penilaian kinerja maka dapat dievaluasi sejauh mana kinerja perpustakaan tersebut.

Dalam menganalisis hasil penelitian di SMA Pawyatan Daha Kediri, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan perpustakaan sekolah meliputi 4 dimensi yaitu: responsivitas, kehandalan (reliability), etika pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Dimensi tersebut di analisis dan di interpretasikan sebagai berikut.

a. Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu dimensi yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan perpustakaan secara langsung dengan tujuan agar ada keselarasan antara program pelayanan perpustakaan sekolah dengan kebutuhan dan aspirasi siswa sebagai pengguna perpustakaan. Osborne dan Plastrik (2000:56) mengemukakan bahwa “organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga”.

Dimensi responsivitas pelayanan perpustakaan sekolah dijabarkan menjadi beberapa indikator:

(1) respon petugas dalam menanggapi keluhan pengguna;

Keluhan yang disampaikan oleh para siswa sebagai pengguna perpustakaan sekolah merupakan indikator responsivitas dalam pelayanan perpustakaan sekolah. Masih adanya keluhan dari siswa terhadap pelayanan yang di berikan oleh petugas perpustakaan sekolah memperlihatkan bahwa kinerja pelayanan perpustakaan sekolah masih perlu terus-menerus ditingkatkan, terutama sekali petugas pelayanan harus lebih responsif terhadap keluhan yang disampaikan oleh para siswa.

Keluhan yang paling banyak dari siswa adalah dalam pelayanan peminjaman buku. Sering sekali siswa harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan buku yang mau dibaca, kadang buku yang ada tidak sesuai dengan yang di pesan bahkan bukunya tidak ada. Hal-hal seperti ini yang membuat kecewa siswa sebagai pengguna karena harus mencari buku yang lain dengan menelusur kembali ke katalog.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang ada tidak memberikan kepastian waktu pelayanan dimana siswa masih harus menunggu cukup lama. Dalam beberapa kasus bahkan terkadang beberapa siswa tidak mendapatkan buku yang diinginkan sehingga mereka merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Ketidaklancaran dalam peminjaman buku ini antara lain disebabkan masih terdapatnya kartu katalog yang bukunya sudah tidak ada lagi di jajaran koleksi dan tidak adanya keterangan mengenai status keberadaan bahan pustaka dalam jajaran koleksi. Sehingga dapat terjadi ketika pengguna menelusur melalui katalog kartu, sumber informasinya ada namun buku yang diinginkan tidak ada dalam jajaran koleksi buku perpustakaan sekolah.

Dilain sisi ketidak lancaran dalam peminjaman buku tidak semata-mata disebabkan oleh faktor petugas pelayanan tetapi justru siswa sendiri yang membuat pelayanan tidak lancar seperti siswa dalam mengisi kartu peminjaman buku terkadang tidak lengkap sehingga menyulitkan petugas dalam mengambil buku dalam jajaran koleksi.

Berdasarkan pengamatan masih adanya buku-buku yang dipinjam oleh para siswa dan belum dikembalikan dengan jangka waktu yang lama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa disiplin siswa siswi sekolah masih rendah untuk mengembalikan buku yang dipinjam.

Alasan lainnya terhadap keluhan ini adalah berkaitan dengan kuantitas dan kualitas dari petugas pelayanan itu sendiri. Kurangnya kualitas petugas pelayanan terutama yang menguasai bidang-bidang tertentu akan membawa dampak dalam pelayanan peminjaman buku, dimana petugas pelayanan masih kesulitan dalam menelusur buku yang diinginkan oleh siswa. Hal ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan petugas pelayanan perpustakaan sekolah yang rata-rata masih berpendidikan SLTA.

Masih adanya keluhan siswa merupakan hasil dari kompleksitas permasalahan yang ada dalam pelayanan perpustakaan sekolah baik dari aspek sistem prosedur pelayanan, petugas pelayanan maupun dari aspek penggunanya sendiri. Dilain sisi belum semua siswa berani untuk menyampaikan keluhannya secara langsung ke petugas pelayanan perpustakaan.

(2) Sikap petugas pelayanan dalam memberikan bantuan

Sikap petugas pelayanan dalam memberikan bantuan secara cepat ketika siswa mengalami kesulitan atau masalah dalam proses pelayanan merupakan sikap yang responsif terhadap kebutuhan siswa. Hasil survei menunjukkan bahwa petugas pelayanan belum sepenuhnya memberikan bantuan secara cepat disaat siswa mengalami kesulitan. Terutama sekali dalam pelayanan katalog dan rujukan, pelayanan peminjaman buku, peminjaman surat kabar dan majalah.

Dalam hal ini penulis memberikan angket kepada responden sebanyak 58 siswa mengenai sikap petugas dalam memberikan bantuan pelayanan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan petugas pelayanan akan memberikan bantuan secara cepat bila siswa mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan sudah menjadi tugas rutin bagi setiap petugas pelayanan perpustakaan. Sebanyak 43 siswa menyatakan bahwa petugas pelayanan pendaftaran anggota memberikan bantuan secara cepat. Dalam hal pelayanan pendaftaran anggota perpustakaan petugas pelayanan memberikan kemudahan bagi pengguna baik kemudahan administrasi maupun kemudahan yang lainnya. Seperti contoh waktu siswa mau mendaftar menjadi anggota perpustakaan namun tidak membawa kartu pelajar padahal syarat untuk menjadi anggota harus menyertakan identitas kartu pelajar tetapi petugas pelayanan yang ada memberikan kemudahan dengan membolehkan mendaftar terlebih dahulu baru kemudian kartu pelajarnya menyusul kemudian.

Namun demikian siswa yang menyatakan petugas pelayanan tidak cepat dalam memberikan bantuan di saat siswa mengalami kesulitan atau masalah dalam proses pelayanan juga masih cukup banyak. Terutama sekali dalam hal pelayanan katalog dan rujukan sebanyak 28 siswa menyatakan petugas pelayanan belum memberikan bantuan secara cepat ketika mereka memerlukan bantuan.

(3) Ketersediaan informasi pelayanan

Pelayanan perpustakaan sekolah akan berdayaguna dan dapat dimanfaatkan oleh siswa bila didukung oleh adanya ketersediaan informasi pelayanan yang jelas, dapat terlihat dan mudah diketahui oleh siswa. Ketersediaan informasi pelayanan juga merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan. Semakin mudah siswa memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan semakin tinggi transparansi. Pada kenyataannya, para siswa sering tidak tahu apa-apa mengenai praktik pelayanan perpustakaan sekolah yang ada karena tidak adanya kejelasan informasi.

Hasil survei menunjukkan bahwa ketersediaan informasi mengenai program-program pelayanan masih tidak diketahui oleh siswa sebanyak 33 siswa menyatakan tidak mengetahui adanya informasi mengenai program-program pelayanan. Informasi mengenai program-program pelayanan masih belum mudah ditemukan oleh siswa di tempat-tempat yang strategis. Berkaitan dengan siswa yang menyatakan tidak mengetahui adanya informasi pelayanan banyak siswa yang berpendapat bahwa informasi peminjaman buku harusnya ditempel di papan informasi perpustakaan sekolah. Kadang siswa sebagai pengguna kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan perpustakaan yang ada.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan dalam menemukan informasi mengenai pelayanan perpustakaan yang ada. Dilain sisi petugas pelayanan seringkali kurang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa apalagi yang ditanyakan diluar tugas rutinnnya sehari-hari. Adapun dari posisi penyelenggara pelayanan, mengenai program-program pelayanan yang melibatkan pengguna hal ini selalu di informasikan ke siswa baik di dalam perpustakaan maupun disosialisasikan langsung ke dalam kelas.

b. Keandalan (Realibility)

Dimensi keandalan mempunyai peranan yang menentukan dalam keberhasilan sebuah penyelenggaraan pelayanan perpustakaan sekolah. Dimana dimensi keandalan merupakan suatu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya.

Menurut Parasuraman (2001:275) "kehadalan harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan dan tanpa kesalahan". Dimensi Keandalan (realibility) dalam konteks pelayanan perpustakaan sekolah dijabarkan dalam indikator berikut ini:

(1) Prosedur dan ketepatan waktu pelayanan

Prosedur pelayanan yang mudah merupakan salah satu kehandalan dalam memberikan pelayanan kepada para siswa. Menurut KepMenPan (1995:81)

”kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari indikator kesederhanaan yaitu prosedur atau tata cara pelayanan harus didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan menjadi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan”.

Namun dalam realitasnya prosedur pelayanan belum sepenuhnya menunjukkan kehandalan dalam memberikan pelayanan kepada para siswa terutama sekali dalam hal prosedur peminjaman buku. Permasalahan pokok dalam prosedur peminjaman buku adalah berkaitan dengan prosedur pelayanan peminjaman koleksi perpustakaan sekolah yang menerapkan sistem layanan tertutup dimana siswa tidak dapat langsung mengakses ke ruang penyimpanan koleksi sebagaimana sistem layanan terbuka. Hal ini oleh sebagian siswa tidak memberikan kemudahan dalam mendapatkan koleksi yang diinginkan dimana siswa harus terlebih dahulu menelusur melalui sarana katalog kartu yang ada, belum lagi harus menunggu untuk mendapatkan koleksi yang diperlukan.

Berdasarkan observasi lapangan, siswa yang belum terbiasa menelusur informasi melalui katalog kartu akan merasakan kesulitan dalam mendapatkan koleksi yang diinginkan. Dilain sisi pelayanan katalog dan rujukan belum menyediakan manual maupun buku petunjuk tentang bagaimana menggunakan katalog kartu. Ketepatan waktu pelayanan yaitu dimana pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Hasil survei menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelayanan belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini antara lain terkait dengan prosedur peminjaman buku dimana siswa masih harus menunggu lama untuk mendapatkan buku yang diperlukannya sehingga siswa tidak mendapatkan kepastian waktu pelayanan.

Berdasarkan observasi lapangan ketidaktepatan waktu pelayanan hal ini dikarenakan petugas pelayanan biasanya belum sepenuhnya siap untuk memberikan pelayanan. Padahal jam buka perpustakaan sekolah sudah ditentukan, namun pada saat rapat koordinasi perpustakaan sekolah.

(2)Kelengkapan atau perkembangan buku perpustakaan (*up to date*);

Menurut Stoker (1993 : 49) “perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang koleksinya relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya”. Oleh karena itu perpustakaan harus mengembangkan koleksi dalam rangka memenuhi permintaan penggunanya baik dari segi kelengkapan dan keakuratan koleksi.

Kelengkapan buku merupakan salah satu unsur dalam menilai kehandalan pelayanan perpustakaan sekolah. Dengan adanya koleksi perpustakaan yang lengkap maka kebutuhan para siswa dapat terpenuhi. Dalam realitasnya koleksi yang ada kurang memenuhi harapan para siswa sehingga tidak memberikan kepuasan bagi siswa.

Berkaitan kurang lengkapnya koleksi perpustakaan sekolah yang ada, hal ini dikarenakan kurangnya dana atau bantuan yang diterima perpustakaan untuk membeli koleksi buku lainnya. Sehingga dapat dimaklumi masih banyaknya siswa yang menyatakan koleksi yang ada kurang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan sekolah juga perlu diperhatikan lebih baik lagi oleh pihak sekolah karena perpustakaan sekolah merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh siswa untuk menunjang proses belajar mereka.

(3)Kemampuan komunikasi petugas pelayanan

Kemampuan komunikasi petugas pelayanan merupakan kemampuan dalam menyampaikan informasi kepada siswa dalam bahasa yang dapat dimengerti dan mendengarkan keluhan dan saran mereka. Dengan adanya jalinan komunikasi ini maka petugas pelayanan dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan siswa. Indikator kemampuan berkomunikasi petugas pelayanan perpustakaan sekolah di kategorikan sebagai berikut: Kemampuan komunikasi petugas layanan informasi, pendaftaran anggota, peminjaman buku, katalog dan rujukan. Seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Secara umum sebagian besar siswa menyatakan petugas pelayanan perpustakaan sekolah yang ada mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Terutama sekali dalam hal pelayanan pendaftaran anggota sebanyak 50 siswa menyatakan petugas pelayanan perpustakaan sekolah mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.

c. Etika Pelayanan

Didalam penyelenggaraan pelayanan perpustakaan sekolah etika pelayanan merupakan suatu panduan norma bagi petugas pelayanan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada para siswa. Perilaku petugas pelayanan yang memiliki etika dapat tercermin pada sikap sopan, ramah, rapi dalam memberikan pelayanan. Petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan sudah sepatasnya tidak mengharapkan sesuatu dan tidak bertindak diskriminatif kepada para siswa.

Memberikan sapaan kepada siswa yang berkunjung ke perpustakaan merupakan salah satu bentuk perilaku etika pelayanan dimana siswa akan merasa nyaman dan dihargai sebagai pengguna perpustakaan sekolah. Pengamatan yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa ada kecenderungan petugas pelayanan perpustakaan sekolah tidak memberikan sapaan seperti “selamat pagi” “selamat siang” atau sapaan “ada yang bisa dibantu” ketika siswa datang ke perpustakaan. Dilain sisi biasanya petugas pelayanan akan memberikan sapaan jika siswa yang datang sudah dikenal, hal ini sudah barang tentu petugas pelayanan bersikap diskriminatif dalam memberikan sapaan kepada siswa.

Di sisi lain dengan sikap sopan petugas pelayanan perpustakaan sekolah dalam memberikan pelayanan sebgai besar para siswa meyakini petugas pelayanan sudah bersikap sopan dalam memberikan pelayanan. Namun pengamatan yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa masih adanya kecenderungan diskriminasi petugas pelayanan perpustakaan sekolah terhadap para siswa. Hal ini dapat mengakibatkan siswa tidak mau datang atau berkunjung ke perpustakaan sekolah, dikarenakan kurang begitu nyaman dengan sikap petugas pelayanan perpustakaan yang cenderung acuh kepada mereka.

Petugas pelayanan akan memberi perhatian yang lebih dalam proses pelayanan, begitu juga dalam memberikan sapaan dan bersikap lebih sopan jika yang dilayani siswa yang sudah dikenal. Namun demikian sikap diskriminatif ini tidak banyak dilakukan oleh petugas pelayanan.

d. Fasilitas Pelayanan

Kinerja pelayanan perpustakaan sekolah tidak semata-mata hanya dinilai dari aspek sistem pelayanan, petugas pelayanan, dan koleksi, menurut Gorman (1991:5) “perpustakaan juga harus memperhatikan aspek fasilitas yaitu berupa dana, gedung atau ruangan, perlengkapan dan prasarana”.

Berdasarkan ISO 11620-1998 mengenai indikator kinerja perpustakaan, ketersediaan fasilitas merupakan salah satu aspek kinerja yang perlu diukur dengan tujuan menilai apakah fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan benar-benar digunakan oleh pengguna dan apakah fasilitas yang disediakan telah memberikan kenyamanan bagi pengguna. Dimensi fasilitas pelayanan dijabarkan menjadi 2 indikator, seperti: kebersihan dan kenyamanan perpustakaan sekolah.

Berdasarkan observasi lapangan bahwa masih kurang terjaganya kebersihan tempat buku hal ini dikarenakan kurang perhatiannya tenaga kebersihan perpustakaan sekolah terhadap tempat buku karena banyaknya rak-rak buku yang tidak terurus dengan rapi dan tempatnya yang begitu sempit. Sehingga dapat dimaklumi bahwa dengan adanya keterbatasan ruang perpustakaan sekolah maka dapat menimbulkan kurang terjaganya kebersihan dan kerapian rak-rak buku yang tidak terurus dengan baik.

Kondisi lingkungan yang nyaman yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada para siswa sebagai penerima pelayanan perpustakaan sekolah. Masih banyak siswa yang merasa kurang nyaman saat berkunjung ke perpustakaan sekolah.

Beberapa siswa berpendapat bahwa tempat buku sebaiknya ditata kembali karena kurang nyaman dan terkadang buku-bukunya pun tidak tertata dengan baik sehingga mengganggu siswa dalam mencari buku dan kurang memberikan kenyamanan.

Diskusi

Pada realitasnya masih banyak siswa yang kurang berminat untuk datang ke perpustakaan sekolah tentang data pengunjung perpustakaan sekolah. Setiap satu minggu terdapat rata-rata 58 siswa yang berkunjung ke perpustakaan sekolah dari jumlah seluruh siswa 271 atau sekitar 21,4% siswa yang berminat untuk datang ke perpustakaan sekolah.

Kurang minatnya siswa untuk datang ke perpustakaan di karenakan beberapa faktor antara lain: berkurangnya minat baca siswa terhadap buku, terkalahkan oleh media internet dalam mencari informasi yang lebih cepat, dan faktor lain yang membuat siswa kurang berminat adalah dari segi pelayanan atau tampilan dari perpustakaan sekolah.

Perpustakaan yang baik dapat dilihat dan diukur dari keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan pemakainya dan dapat melayani dengan kemampuan yang dimiliki kepada masyarakat pemakainya. Semakin baik dalam melayani pemakai, semakin tinggi penghargaan yang akan diberikan kepada perpustakaan.

Seperti halnya perpustakaan di SMA Pawyatan Daha Kediri perlu adanya perbaikan pada kinerja petugas pelayanan perpustakaan. Pada penelitian yang dilakukan penulis sesuai dengan indikator kinerja petugas pelayanan perpustakaan yang perlu diperbaiki dalam melayani siswa yaitu:

a. Responsivitas

Berdasarkan observasi lapangan terkait dengan kurangnya respon petugas dalam menanggapi keluhan para siswa. Pada umumnya siswa enggan menyampaikan keluhan dengan berbagai pertimbangan. Adapun alasan yang paling sering dikemukakan adalah keseganan siswa terhadap petugas pelayanan, ada ketakutan dari siswa jika menyampaikan keluhan justru mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Hal ini berkaitan dengan kultur budaya siswa yang masih menganggap bahwa petugas pelayanan adalah aparat birokrasi yang selalu harus dihormati sehingga siswa lebih memilih menerima pelayanan apa adanya.

Rendahnya siswa yang menyampaikan keluhannya kepada petugas pelayanan juga menunjukkan bahwa sikap kritis para siswa terhadap kinerja pelayanan perpustakaan sekolah belum terbangun dengan baik. Siswa masih bertoleransi terhadap pelayanan yang ada. Hal ini menunjukkan belum adanya komunikasi yang interaktif antara petugas pelayanan perpustakaan sekolah dengan para siswa, maka dari itu perpustakaan sekolah perlu memberikan kotak saran dan kritik, agar siswa yang tidak berani menyampaikan keluhannya langsung kepada petugas dapat menyampaikannya melalui tulisan di kertas dan di masukan ke dalam kotak saran yang terdapat di perpustakaan sekolah.

Dilain sisi respon petugas pelayanan dalam menanggapi keluhan siswa dirasakan masih memiliki kecenderungan yang rendah. Keluhan yang diajukan ke petugas pelayanan sifatnya hanya dijanjikan untuk diselesaikan, bahkan tidak jarang keluhan hanya dibiarkan saja. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pelayanan belum sepenuhnya menghiraukan keluhan dari siswa. Namun demikian petugas pelayanan sudah berupaya untuk langsung menyelesaikan masalah dan keluhan yang dialami oleh para siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan biasanya petugas pelayanan akan langsung menyelesaikan keluhan siswa bila keluhan itu masih berkaitan dengan tugas rutinnnya bahkan petugas pelayanan akan menyelesaikannya dengan cepat. Namun jika keluhan itu diluar tugas rutinnnya maka petugas pelayanan biasanya hanya berjanji untuk menyelesaikan bahkan tidak jarang hanya membiarkan saja.

Terkait masalah pemberian bantuan kepada siswa, masih adanya siswa yang menyatakan petugas pelayanan tidak memberikan bantuan secara cepat hal ini dikarenakan pada saat-saat jam sibuk petugas pelayanan harus dapat membagi tugas sehingga petugas tidak bisa secara cepat memberikan bantuannya. Masih adanya petugas pelayanan meninggalkan tugas-tugas pelayanan kepada siswa hal ini dikarenakan petugas pelayanan terkadang mempunyai kegiatan lain di luar kegiatan rutin seperti tugas tambahan.

Oleh karena itu perlu adanya penambahan petugas perpustakaan sekolah yang benar-benar bertugas di perpustakaan, agar disaat petugas lain pergi untuk mengerjakan tugas tambahan dari sekolah dan meninggalkan tugas pelayanan perpustakaan dapat digantikan sementara oleh petugas yang ada di perpustakaan.

Dalam hal kurangnya pemberitahuan informasi tentang perpustakaan, pihak pelayanan perpustakaan telah berupa dalam mensosialisasikan program-program informasi perpustakaan

sekolah yang ada, namun dalam realitasnya masih banyak siswa yang belum mengetahui adanya informasi mengenai program-program pelayanan yang melibatkan partisipasi siswa. Begitu pula dengan program-program pelayanan yang melibatkan partisipasi siswa belum banyak di ketahui oleh siswa. Para siswa juga harus berperan untuk mensosialisasikan program pelayanan perpustakaan sekolah kepada siswa lain yang belum mengerti.

Guna mewujudkan transparansi kegiatan pelayanan perpustakaan tidak hanya sebatas mengumumkan secara terbuka. Hal yang terpenting justru bagaimana informasi pelayanan diberikan secara terbuka di tempat yang mudah di akses oleh siswa yang berada di perpustakaan sekolah serta diperlukan peran aktif dari seluruh petugas pelayanan dalam mensosialisasikan kegiatan pelayanan.

b. Keandalan (Realibility)

Dalam hal keandalan pelayanan perpustakaan sekolah terkait prosedur dan ketepatan waktu pelayanan. Sebanyak 25 siswa menyatakan prosedur peminjaman buku belum memberikan kemudahan. Prosedur peminjaman buku masih berbelit-belit, siswa harus terlebih dahulu melihat-lihat katalog yang ada belum lagi format peminjaman buku yang kurang praktis, misalnya untuk meminjam lebih dari dua buku harus menulis nama, nomor anggota secara berulang. Serta dalam ketepatan waktu pelayanan peminjaman buku, sebanyak 21 siswa masih menyatakan tidak adanya ketepatan waktu pelayanan dalam mendapatkan koleksi yang akan dipinjam dan pelayanan katalog dan rujukan sebanyak 17 siswa menyatakan pelayanannya tidak tepat waktu.

Sebaiknya perpustakaan sekolah dapat lebih mempermudah prosedur peminjam buku agar tidak berbelit-belit, seperti membuat katalog online agar siswa dapat melihat langsung katalog melalui komputer yang disediakan di perpustakaan. Dengan adanya katalog online ini siswa tidak kebingungan lagi mencari katalog yang terkadang tidak tersusun rapi di rak katalog, tetapi para siswa dapat langsung mencari buku yang diinginkan melalui katalog yang tersimpan difolder yang ada di komputer perpustakaan. Hal ini juga dapat membuat pelayanan katalog dan rujukan lebih tepat waktu dalam melayani serta mempermudah pekerjaan petugas perpustakaan.

Terkait kurang lengkapnya koleksi buku di perpustakaan, secara umum hampir sebagian besar siswa menyatakan koleksi yang ada tidak lengkap. Terutama untuk koleksi buku, sebanyak 35 siswa menyatakan koleksi buku tidak lengkap dan untuk koleksi majalah sebanyak 32 siswa menyatakan tidak lengkap. Masih banyaknya siswa yang menyatakan tidak lengkapnya koleksi perpustakaan sekolah, terdapat beberapa siswa yang berpendapat bahawa koleksi buku yang ada masih belum lengkap, ketika mereka mencari buku-buku mengenai teknologi informasi ternyata koleksinya masih sedikit, justru buku yang paling banyak adalah buku mengenai ilmu sosial.

Dalam hal ini seharusnya petugas perpustakaan lebih update lagi mengenai buku terbaru dan permintaan para siswa terhadap buku yang diinginkannya. Selain itu pihak sekolah juga harus lebih memperhatikan perpustakaan sekolah, seperti menganggarkan dana tiap tahun untuk perpustakaan sekolah agar dana tersebut dapat dibelikan buku-buku terbaru yang dibutuhkan siswa untuk belajar. Tidak hanya anggaran dana untuk buku pokok seperti buku paket atau LKS tetapi juga buku-buku referensi lainnya agar para siswa dapat mencari referensi lain dalam belajar dan perpustakaan sekolah dapat memiliki buku-buku terbaru. Dengan adanya koleksi buku yang update hal ini dapat menarik minat siswa untuk datang ke perpustakaan sekolah.

Dalam hal kemampuan komunikasi petugas pelayanan perpustakaan sekolah, banyak siswa yang menyatakan bahwa petugas pelayanan perpustakaan sekolah memiliki kemampuan komunikasi yang baik, namun demikian siswa yang menyatakan petugas pelayanan belum memiliki kemampuan komunikasi juga masih banyak, sebanyak 23 siswa menyatakan petugas pelayanan katalog dan rujukan masih belum memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Hal ini juga menunjukkan bahwa jalinan komunikasi antara siswa dengan petugas pelayanan perpustakaan sekolah belum berjalan dengan baik. Petugas pelayanan belum sepenuhnya berorientasi kepada pelayanan siswa tetapi masih beroorientasi kepada tugas sehari-hari dan masih terpaku pada tugas rutin. Sehingga dalam berkomunikasi dengan siswa masih sebatas memberikan jawaban sesuai dengan tugas rutinya.

Oleh karena itu perlu diadakannya pelatihan pelayanan perpustakaan sekolah supaya petugas perpustakaan dapat lebih memahami pentingnya komunikasi yang baik kepada para siswa

dan lebih mementingkan tugas pelayanan kepada siswa dibandingkan tugas sehari-hari mereka, agar para siswa dapat merasakan pelayanan yang baik dari petugas pelayanan perpustakaan sekolah dan dapat menjadikan jalinan komunikasi antara petugas dengan siswa lebih baik lagi.

c. Etika Pelayanan

Secara umum hampir sebagian besar siswa menyatakan bahwa petugas pelayanan tidak memberikan sapaan di saat siswa datang ke perpustakaan. Sebanyak 31 siswa menyatakan petugas katalog dan rujukan tidak memberikan sapaan kepada siswa.

Masih tingginya pernyataan siswa terhadap petugas pelayanan perpustakaan sekolah yang tidak memberikan sapaan ketika siswa datang ke perpustakaan menunjukkan bahwa petugas pelayanan sebagai birokrat pada umumnya masih menganggap dirinya lebih tinggi daripada siswa pengguna. Sehingga pelayanan publik yang diberikan belum berorientasi pada kepuasan siswa. Oleh karena itu budaya birokrasi sudah seharusnya lebih menekankan pada pelayanan siswa dan menghargai hak dan martabat siswa sebagai pengguna perpustakaan sekolah.

Sebagaimana siswa menyatakan bahwa petugas pelayanan perpustakaan sekolah sudah memberikan sikap sopan dalam melayani, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal kesopanan petugas pelayanan sudah memenuhi etika pelayanan. Namun demikian sikap sopan dalam hal pelayanan ini masih perlu ditingkatkan terutama sekali dalam hal pelayanan katalog dan rujukan, sebanyak 17 siswa masih menyatakan petugas pelayanan belum bersikap sopan.

Dengan demikian masih cukup banyaknya siswa yang menyatakan petugas pelayanan perpustakaan sekolah belum memberikan sapaan dan bersikap sopan mengindikasikan bahwa etika pelayanan belum sepenuhnya di terapkan. Disisi lain program kegiatan bimbingan etika pelayanan bagi petugas pelayanan perpustakaan yang telah dilakukan perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Sehingga program bimbingan etika pelayanan benar-benar dapat memperbaiki kinerja petugas pelayanan perpustakaan.

d. Fasilitas Pelayanan

Dari hasil survei mengenai kebersihan perpustakaan sekolah menunjukkan fasilitas pelayanan perpustakaan dari segi kebersihan ruangan secara umum dapat dikatakan bahwa ruangan yang ada sudah terjaga kebersihannya.

Namun demikian mengenai kebersihan tempat buku masih cukup banyak yaitu sebanyak 16 siswa yang menyatakan tempat buku tidak terjaga kebersihannya. Hal ini dikarenakan banyaknya rak buku di perpustakaan dan terlalu sempitnya tempat untuk menyusun rak-rak buku tersebut.

Serta dalam kenyamanan perpustakaan sesuai dengan hasil penelitian bahwa siswa kondisi lingkungan belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi siswa, sebanyak 25 siswa menyatakan tempat buku yang belum memberikan kenyamanan.

Kondisi yang masih kurang nyaman di perpustakaan sekolah ini bukan hanya dirasakan oleh siswa, melainkan petugas perpustakaan juga merasakannya sehingga ada upaya dari petugas untuk menata kembali ruangan yang ada. Dalam hal ini petugas perpustakaan sekolah khususnya petugas kebersihan perpustakaan lebih perhatian terhadap kebersihan perpustakaan sekolah agar para siswa nyaman dan senang untuk datang ke perpustakaan sekolah.

Oleh karena itu sesuai dengan permasalahan kebersihan perpustakaan dan kenyamanan siswa, maka perlu adanya tambahan ruangan untuk perpustakaan sekolah. Seperti contoh memakai 2 ruang kelas yang tidak terpakai, satu untuk ruang baca dan yang satunya lagi dapat dijadikan untuk ruang rak buku agar rak-rak buku dapat disusun dengan rapi dan kebersihan ruang perpustakaan dapat dijaga dengan baik. Serta perlu adanya penambahan petugas kebersihan perpustakaan apabila diperlukan untuk penambahan ruangan yang baru.

Kesimpulan

Dilihat dari semua indikator yang dipakai dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan: (1) responsivitas pelayanan di perpustakaan sekolah masih rendah sebagaimana ditunjukkan masih adanya keluhan dari pengguna layanan terhadap penyedia layanan perpustakaan sekolah; (2) kehandalan petugas pelayanan perpustakaan sekolah masih belum relevan, hal ini dapat dilihat masih belum lengkapnya koleksi perpustakaan sekolah dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan; (3) etika pelayanan perpustakaan sekolah masih rendah dan belum sesuai dengan standar pelayanan

Perpustakaan Nasional. Petugas kurang begitu menghargai dan terkesan acuh kepada pengguna, hal ini menjadikan pengguna kurang berminat datang ke perpustakaan sekolah; (4) fasilitas pelayanan perpustakaan sekolah belum menunjukkan kinerja pelayanan yang baik, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pengguna yang masih belum nyaman terhadap penataan fasilitas perpustakaan serta belum terjaganya kebersihan.

Daftar Pustaka

- Andrew, E. Sikula. 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung, Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2000, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi 13, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Bafadal, Ibrahim. 2009, Pengolahan Perpustakaan Sekolah, Edisi V, Jakarta, Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung.
- Kasmir. 2010, Etika Costumer Service, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Keban, T. Yeremias. 2004, Kualitas Kinerja Pustakawan, Yogyakarta, Gava Media.
- Mangkunegara, A. A. 2005, Manajemen Sumber Daya Manusi, Bandung, Refika Aditama.
- M. Yusuf, Pawit. 2007, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, Edisi II, Jakarta, Kencana.
- Nazir, Moh. 2000, Metode Penelitian, Bandung, Tarsito.
- Osborn, David & Peter Plastrik. 2000, Banishing Bureaucracy: the five strategies for reinventing government, California, Addison-Weesley Publishing.
- Robbins, Stephen P. 2006, Perilaku Organisasi, Edisi X, Jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Sastrohadiwiryo, B.S. 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Soedaryono. 2000, Tata Laksana Kantor, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Sudarsono, Blasius. 2005. Membangun Kemampuan Pustakawan, Jakarta, Media Pustakawan.
- Sugiyono. 2003, Statistika untuk penelitian, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D, Edisi 8, Bandung, Alfabeta.
- Sulistyo-Basuki. 2005, Pengantar Ilmu Perpustakaan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarno. 2005, Tanggung Jawab Perpustakaan Dalam Mengembangkan Masyarakat Informasi, Jakarta, Pante Rai.
- Undang-undang. Republik Indonesia, 2007, Perpustakaan, no. 43, Yogyakarta, Pustaka Timur.
- Undang-undang. Republik Indonesia, 2003, Sistem pendidikan Nasional, no. 20, Jakarta, CV Eka Jaya.

Implementasi Program Merdeka Belajar Menuju Era Society 5.0

Rachmalia Novita Cahyani^{*1}, Aisyah Aulia Zahro², Achmad Arrizal Afifuddin³

¹²³Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah

*Corresponding author: rachmalia90@gmail.com

Abstrak

Society 5.0 adalah era yang menggabungkan konsep masyarakat berbasis teknologi yang berpusat pada manusia yang diadvokasi oleh pemerintah Jepang. Pada era ini masyarakat khususnya peserta didik perlu meningkatkan soft skill agar dapat meningkatkan skill dan learning skill sehingga dapat menjadi modal untuk menjadi tenaga kerja yang lebih terampil di masa yang akan datang. Siswa maupun mahasiswa menghadapi perubahan akibat perkembangan teknologi saat ini. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, menyelenggarakan program studi dengan konsep Pendidikan Merdeka, sebuah konsep yang digagas untuk memberikan kebebasan berpikir kritis dan intelektual kepada peserta didik. Pada artikel ini, kami akan mencoba mempertimbangkan seperti apa implementasi pembelajaran mandiri di sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia di era Society 5.0. Penulisan artikel ini menggunakan studi literatur dengan mengkaji beberapa jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas secara kualitatif. Hasil kajian pada artikel ini menunjukkan implementasi kurikulum merdeka belajar memiliki keterkaitan dengan era society 5.0. Kemampuan yang harus dimiliki adalah kreativitas dan inovasi sehingga menjadi sumber daya manusia yang tangguh, terampil dan ulet. Implementasi merdeka belajar dilakukan dengan perencanaan yang matang mampu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia serta dapat menyiapkan lulusan sarjana yang berprestasi dan mampu bersaing secara global.

Kata Kunci: era society 5.0, kurikulum merdeka belajar, peningkatan sumber daya manusia.

Abstract

Society 5.0 is an era that combines the concept of a human-centered technology-based society advocated by the Japanese government. In this era, the community, especially students, need to improve their soft skills in order to improve their skills and learning skills so that they can become capital to become a more skilled workforce in the future. Students and students face changes due to current technological developments. Therefore, the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia, Nadiem Makarim, organized a study program with the concept of Merdeka Education, a concept that was initiated to give students the freedom to think critically and intellectually. In this article, we will try to consider what the implementation of independent learning in high schools and universities in Indonesia will look like in the Society 5.0 era. The writing of this article uses a literature study by reviewing several journals that are relevant to the topics discussed qualitatively. The results of the study in this article show that the implementation of the independent learning curriculum is related to society in the 5.0 era. The capabilities that must be possessed are creativity and innovation so that they become strong, skilled and tenacious human resources. The implementation of independent learning is carried out with careful planning that can improve the quality of Indonesian education and can prepare graduates who excel and are able to compete globally.

Keywords: era of society 5.0, independent learning curriculum, improvement of human resources.

Pendahuluan

Teknologi terus maju menciptakan peradaban yang lebih baik untuk semua. Beberapa waktu lalu muncul istilah revolusi 4.0 yang menunjukkan berbagai sisi baru dari teknologi dan tidak lama kemudian muncul pula istilah *Society 5.0* yang menekankan *human centered* atau berpusat pada manusia dalam implementasi basis teknologi yang tengah dan akan terus berkembang (Haqqi & Wijayati, 2019). Era *Society 5.0* muncul bukan tanpa sebab, namun dikarenakan kebutuhan manusia yang terus berkembang, salah satunya pada bidang pendidikan. Perkembangan *Society 5.0* memiliki karakteristik yang berbeda (Kosasih, 2015).

Pada bidang pendidikan, khususnya era 5.0 muncul dikarenakan adanya tuntutan bagi manusia agar bisa selaras dengan teknologi dalam menciptakan peluang-peluang kreatif dan inovatif (Arjunaita, 2020). Tujuan dari hal tersebut salah satunya adalah untuk pengembangan sumber daya manusia. Era *Society 5.0* sebagai kelanjutan dari Era Revolusi Industri 4.0 merupakan teknologi yang dianggap akan menimbulkan penurunan manusia (Ngafifi, 2014). *Society 5.0* merupakan era yang dicetuskan oleh pemerintahan Jepang. Konsep masyarakat berpusat pada manusia dan berbasis teknologi (Arno et al., 2019). Di dalam konsep "*Society 5.0*" ini manusia berperan penting dengan mentransformasi *big data* menjadi suatu kearifan baru yang meningkatkan kemampuan manusia untuk membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan demi tercapainya kehidupan bermakna (F. Nastiti & Abdu, 2020).

Dengan hadirnya Era *Society 5.0*, Indonesia dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar mampu menemukan solusi dalam memenuhi kebutuhannya dengan terus menggali informasi, serta menciptakan inovasi baru guna menunjang kelangsungan hidupnya agar dapat bersaing di dunia global yang lebih kompleks. Hal ini merupakan tantangan pendidikan untuk menciptakan SDM yang berkualitas di masa depan. Penelitian sebelumnya dari McKinsey menunjukkan, bahwa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan salah satunya adalah minimnya SDM yang berkualitas (Ningrum, 2016). Sistem pendidikan Indonesia masih dinilai kurang karena belum mampu menghasilkan SDM yang berkualitas. Dalam menghadapi Era *Society 5.0*, bidang pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Maka dari itu, pemerintah mulai menerapkan program merdeka belajar. Program ini dibuat agar menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja serta kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, mahasiswa harus disiapkan untuk bisa bersiap sesuai dengan kebutuhan zaman (Tohir, 2020) Program merdeka belajar ini muncul dari keluhan dari orang tua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini. Menurut pandangan Setiawan (dalam Hamka, 2016) kata "merdeka" mempunyai tiga dimensi yaitu:

1. Merdeka kemauan bermakna berani menyuruh, dan menciptakan perkara yang baik dan diterima baik oleh masyarakat.
2. Merdeka pikiran, atau bebas menyatakan pikiran, yaitu melarang, mengkritik, menjelaskan ucapan yang melanggar.
3. Kemerdekaan jiwa, bebas dari ketakutan. Dalam konteks merdeka belajar, pandangan Hamka ini memberikan makna bahwa dalam belajar harus dilakukan dengan membangun kemauan dan semangat, mewujudkan kebebasan untuk menyatakan pikiran, dan bebas dari segala bentuk rasa ketakutan (Mansur, 2018).

Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya baik lahir maupun batin tidak tergantung pada orang lain akan tetapi bersandar atas kekuatan yang dia miliki (Anggaira, 2021). Adapun merdeka belajar bermakna memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik secara bebas, nyaman, damai, dan tanpa tekanan tentunya memperhatikan bakat alami yang ia alami, atau bidang yang dikuasainya (Wardhana et al., 2020). Masing-masing dari mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya yang dapat menunjang ketercapaian pembelajaran bermakna dan keterampilan 4C yang menjadi target karakter dan keterampilan peserta didik pada sistem evaluasi kecakapan abad ke-21. Keterampilan dasar 4C tersebut harus dimiliki oleh peserta didik untuk memecahkan suatu masalah, antara lain yaitu:

1. *Critical Thinking* (berpikir kritis)
2. *Communication* (komunikasi)
3. *Collaboration* (kolaborasi)
4. *Creativity and Innovation* (kreatif dan inovatif)

Program hak belajar tiga tahun di luar program studi merupakan salah satu dari kebijakan MBKM yang merupakan amanah dari regulasi pendidikan tinggi dalam rangka menyiapkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan dunia kerja serta perbaikan mutu pembelajaran. Beberapa kegiatan pembelajaran sesuai dengan permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilaksanakan pada program Hak Belajar Tiga Semester di luar Program Studi meliputi: pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi /proyek independen, dan KKN tematik. Program studi harus berusaha mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan model pengembangan kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka agar mampu mengimplementasikan kebebasan pembelajaran yang fleksibel sesuai kebutuhan mahasiswa agar tidak monoton.

Dengan begitu Pengalaman belajar yang diberikan merdeka belajar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta memenuhi tujuan pendidikan dan bermanfaat bagi pemecahan masalah di kehidupan nyata. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji program merdeka belajar di lingkungan Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempersiapkan generasi muda dengan kompetensi yang relevan dalam menghadapi era *Society 5.0*.

Kurikulum merdeka dimaknai sebagai rancangan pembelajaran dengan memberikankesempatan belajar yang lebih fleksibel, menyenangkan dan bebas tekanan kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat lebih fokus pada bakat dan minat yang dimilikinya (Restu Rahayu, Rita Rosita, Yuyu Sri Rahayuningsih, Herry Hernawan, 2021) Kurikulum ini dikembangkan guna untuk mencetak generasi yang mampu menelaah dengan tanggap setiap konsep yang diberikan oleh pendidik bukan sekedar mampu mengingat materi yang diberikan, peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam setiap pembelajaran (Indarta et al., 2022). Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah kurikulum merdeka belajar mampu menjawab tantangan pada era *Society 5.0*? sehingga memerlukan kajian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan studi literatur yang berfokus pada bagaimana implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka menuju era *society 5.0*, dengan mengkaji referensi secara kualitatif yang berfokus membahas tema "kurikulum merdeka belajar kampus merdeka dalam menghadapi era disrupsi dan era *society 5.0*" dari berbagai sumber bacaan atau referensi dari berbagai sumber bacaan atau referensi berupa jurnal- jurnal, buku maupun internet yang relevan dengan pembahasan yang peneliti kaji. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis literatur yang telah dikaji sebelumnya. Sumber data yang utama dari 5 jurnal nasional, dan pedoman kebijakan melalui merdeka belajar kampus merdeka melalui kemendikbud, undang-undang Negara serta bacaan di internet. Tahapan yang akan dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan bacaan pada artikel ini, yaitu:

1. Mengumpulkan data-data yang relevan dengan topik yang dibahas.
2. Menganalisis bahan bacaan yang telah diperoleh serta menyimpulkan topik utama mengenai kebijakan kurikulum kampus merdeka untuk menyiapkan generasi masa depan yang tanggap dengan tantangan era *society 5.0*.

Berdasarkan hasil kajian literatur tersebut, dapat di jelaskan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dapat menjadi peluang dimana teknologi yang canggih dapat membantu segala macam pekerjaan manusia di segala aspek kehidupan tak terkecuali dalam aspek pendidikan, dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 pendidikan merupakan usaha yang direncanakan untuk menjadikan proses pembelajaran peserta didik terlaksana aktif dalam pengembangan potensi diri. Dengan adanya teknologi dapat menunjang proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien karena dapat diakses dengan mudah dan dapat memperoleh sumber belajar dari berbagai referensi khususnya internet. Tetapi ada juga dampak negatif yang ditimbulkan, dengan banyaknya angka pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi berdampak pada kurangnya masyarakat di usia produktif. Dimana banyaknya pengangguran akibat dari pekerjaan yang dapat digantikan oleh mesin.

Kelebihan Dan Kekurangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Suatu program pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam setiap proses pengimplementasiannya. Pada pembahasan artikel ini penulis menjabarkan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari program merdeka belajar kampus merdeka. Kelebihan dari merdeka belajar kampus merdeka:

1. Menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel
2. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil
3. Memberikan media kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat
4. Bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja.

Kemudian, kekurangan merdeka belajar kampus merdeka yaitu:

1. Dinilai belum begitu matang dalam persiapan
2. Pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik
3. Persiapan SDM yang belum terstruktur.

Hadirnya era society 5.0 yang merupakan penyempurnaan era 4.0 adalah problem besar sekaligus kesempatan besar wajah pendidikan kita. Guru yang menjadi penggerak dalam pendidikan era society 5.0 harus mempunyai kompetensi yang komprehensif. Guru harus berkompeten dalam memberikan materi pelajaran serta mampu menggerakkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif.

Beberapa kemampuan yang harus dimiliki di abad 21 ini meliputi: *leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, team-working*. Apakah pendidikan kita siap untuk menghadapi society 5.0?. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh dunia pendidikan di Indonesia untuk menghadapi society 5.0 yaitu:

1. Infrastruktur, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan perluasan koneksi internet ke semua wilayah Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini belum semua wilayah Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet.
2. SDM yang bertindak sebagai pengajar harus memiliki keterampilan dibidang digital dan berpikir kreatif. Menurut Zulkifar Alimuddin, Director of Hafecs (Highly Functioning Education Consulting Services) menilai di era society 5.0 guru diminta untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas (Alimuddin, 2019).
3. Pemerintah harus bisa mensinkronkan antara pendidikan dan industri agar nantinya lulusan dari perguruan tinggi maupun sekolah dapat bekerja sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh industri sehingga nantinya dapat menekan angka pengangguran di Indonesia.
4. Menerapkan teknologi sebagai alat kegiatan belajar-mengajar, penerbangan untuk lolos uji coba, sebelum melakukan praktik terbang langsung dengan pesawat yang sebenarnya.
5. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam dunia pendidikan untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar. Proses identifikasi kebutuhan siswa akan lebih cepat dengan teknologi machine learning yang tertanam artificial intelligence. Semakin banyak data digital yang terhimpun, semakin cerdas pula sistem artificial intelligence, contohnya: Google Assistant, Siri, dll.

Dengan teknologi-teknologi tersebut, para pelajar disajikan dengan kemudahan dan kecepatan pencarian data, bahkan teknologi tersebut dapat merekomendasikan data yang tadinya tidak terpikirkan oleh mereka. Artificial intelligence tidak hanya menyajikan data mentah, namun juga data yang sudah diolah menjadi data sangat informatif disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Pemanfaatan tiga teknologi diatas yaitu artificial intelligence, IoT dan augmented reality diharapkan bisa menciptakan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang siap pakai di dunia industri (Munanda, 2019).

Dalam kerja kelompok peserta didik dituntut untuk selalu aktif serta diberi kebebasan dalam memberikan partisipasinya dengan mengungkapkan gagasan, sanggahan, atau penguatan terhadap suatu gagasan dalam berdiskusi sehingga terciptanya kolaborasi dan melatih komunikasi antar peserta didik dalam memecahkan masalah secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan diberikannya kesempatan dalam mengemukakan, sanggahan, atau penguatan terhadap suatu gagasan akan menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berani mengemukakan pendapatnya kembali sehingga

dapat membantu memperoleh hasil belajar yang lebih maksimal. Di dukung oleh pernyataan (Pragmatik, 2015) bahwa “Kemampuan berpendapat dapat mengambil peran yang lebih banyak dalam berbagai aspek kehidupan, sebab dalam dunia kerja maupun kedudukan di masyarakat, kemampuan berpendapat selalu digunakan dan diperlukan.” dan hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan pada penelitian dari Hastuti (2017), bahwa proses pembelajaran yang baik ditandai dengan terdapatnya interaksi dua arah. Ditegaskan oleh (Ermi, 2015) bahwa adanya diskusi dalam proses pembelajaran siswa dapat dengan bebas berkomunikasi dalam mengemukakan gagasan dan pendapat, sehingga siswa terdorong untuk berpartisipasi secara optimal. Komunikasi menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif (Wisman, 2017).

Melalui kegiatan magang, permasalahan lembaga tempat magang dapat mengalir ke pihak perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi memberikan pembaharuan pada bahan ajar dan metode pembelajaran yang dilakukan dosen serta topic pada riset perguruan tinggi makin relevan dengan kondisi nyata pekerjaan. Melalui program program kemanusiaan mahasiswa dilatih agar memiliki kepedulian sosial terhadap sesama dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas, berdasarkan agama, moral dan etika. Proses untuk menjalankan program proyek kemanusiaan ini dimulai dari: mahasiswa menentukan program proyek kemanusiaan bersama organisasi resmi – menyusun proposal program – terjun langsung mengikuti proyek kemanusiaan tanggap darurat – proyek kemanusiaan – penilaian – rekognisi – konversi nilai sks – lapor PDDikti. Program Kegiatan Wirausaha, kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan kegiatan belajar yang sesuai dan dengan pengelolaan yang tepat.

Dari paparan kegiatan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, implementasi kurikulum program studi di sesuaikan dengan program Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi sehingga dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Serta menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan di era disrupsi dan memiliki karakter positif serta kepribadian positif untuk menjadi calon penerus bangsa.

Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya yang disadari. secara umum mengemukakan bahwa belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. belajar adalah proses perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap berkat pengalaman dan latihan. Merdeka belajar bermakna memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka.

Hasil

Pengembangan kurikulum mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran (Fajri, 2019). Proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar kampus merdeka merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa. Kemerdekaan belajar yakni memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Implementasi merdeka belajar kampus merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, serta menjadikan pribadi yang mandiri dan memiliki karakter yang positif. Implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka berfokus pada pengembangan keterampilan mahasiswa sebagai calon lulusan sarjana yang diharapkan mampu menjawab segala tantangan di era disrupsi dan era *society 5.0* pada masa mendatang. Hasil dari penulisan artikel ini dengan mengkaji 5 jurnal internasional dan buku panduan merdeka belajar serta beberapa referensi yang relevan. Selanjutnya diuraikan dan dapat ditarik simpulan. Hasil analisis terkait implementasi kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka dalam menghadapi era disrupsi dan era *society 5.0* dapat dijabarkan sebagai berikut: Hasil penelitian Kemdikbud (Kompas, 23-06-2019), Menyatakan bahwa rendahnya literasi masyarakat. Hasil survei UNESCO tahun 2012 mencatat minat baca di Indonesia terendah di Asia Tenggara. Indeks minat membaca Indonesia baru 0,001, dalam arti dari 1.000 orang

Indonesia hanya 1 orang yang memiliki minat membaca. Program *for International Student Assessment* (PISA) yang dirilis *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) tahun 2015 menguatkan survei tersebut dengan temuan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia masih berada di ranking 62 dari 72 negara dan penelitian UNESCO 2016 dengan judul *World's Most Literate Nations 2016* hasil *Central Connecticut State University* (CCSU), Indonesia berada di ranking 60 dari 61 negara atau hanya satu tingkat di atas Botswana. Society 5.0 masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 seperti *Internet on Things* (internet untuk segala sesuatu), *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Big Data* (data dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. CCSU merilis peringkat literasi berbagai negara di dunia pada Maret 2016 berdasarkan lima indikator kesehatan literasi negara, yakni perpustakaan, surat kabar, pendidikan, dan ketersediaan komputer. Padahal infrastruktur Indonesia berada di urutan ke 34, masih lebih unggul dari Jerman, Portugal, Selandia Baru, dan Korea Selatan (Kompas.com, 2016).

Faktor rendahnya minat serta budaya literasi merupakan masalah klasik, yakni akses, harga, dan mutu buku. Hasil penelitian Kemdikbud (Kompas, 23-06-2019) dari Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) penyebab rendahnya minat dan kebiasaan membaca itu antara lain kurangnya akses, terutama untuk di daerah terpencil. Secara lebih rinci dilaporkan Kemdikbud bahwa ada empat dimensi indeks literasi yang menjadi pokok bahasan dalam indeks tersebut, yakni dimensi kecakapan, akses, alternatif, dan budaya. Dari keempat dimensi indeks literasi dimensi kecakapan bisa dilihat dari indikator bebas buta aksara dan rata-rata lama sekolah yaitu:

1. Dimensi akses terdiri atas perpustakaan daerah, perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, dan perpustakaan sekolah.
2. Dimensi alternatif antara lain penggunaan internet, membaca daring, dan media online.
3. Dimensi budaya antara lain meminjam buku di perpustakaan, memanfaatkan taman bacaan, serta membaca koran dan buku.

Hasil penelitian (Marisa, 2021), menyatakan bahwa perkembangan teknologi yang pesat semakin mempengaruhi kehidupan sosial sehingga berdampak pada penurunan usia produktifitas masyarakat. Saat ini semua pekerjaan dilakukan dengan bantuan teknologi canggih. Dengan adanya ketimpangan antara perkembangan teknologi dengan kehidupan sosial. Jepang menggagas konsep era *society 5.0* untuk menyeimbangkan antara perkembangan teknologi dengan masalah sosial yang terkait dengan dunia maya dan fisik. Dengan permasalahan yang ada pendidikan Indonesia membuat kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan yakni dengan inovasi pengembangan kurikulum merdeka belajar yang telah direncanakan pada tahun 2019, yang diharapkan lulusan mampu menghadapi berbagai permasalahan dengan adanya peran teknologi dalam penyelesaian masalah sosial masyarakat.

Hasil penelitian dari sumber bacaan (Aoun, 2017), menyatakan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial akan sangat berperan karena diprediksi pada 2020, 200 milyar objek perangkat teknologi (*internet to things*), yakni perangkat teknologi yang terhubung internet (Intel, 2015) akan dirasakan manfaatnya. Literasi lama tidak cukup (membaca, menulis, dan matematika). Literasi baru adalah literasi data (kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi (*big data*) di dunia digital: literasi teknologi (memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, literasi manusia (*humanities*, komunikasi, dan *desain*)) (Aoun, 2017). Untuk mengembangkan kurikulum, diperlukan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*, ada pedoman pengembangan kurikulum, ada pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya.

Selanjutnya hasil penelitian (Handayani, 2021) menunjukkan dalam lingkup perguruan tinggi diimplementasikan dalam kebijakan merdeka belajar kampus merdeka yang diterapkan melalui kebijakan program studi dengan beragam kegiatan yang bisa menjadi kesempatan bagi para mahasiswa untuk

mendapatkan pengalaman belajar pada dunia pengembangan kurikulum program studi mengadaptasi dan difokuskan pada kegiatan MBKM. Bentuk pengembangan kurikulum meliputi desain kebijakan MBKM, desain standar operasional baku penerapan MBKM, program kerjasama akademik serta mengidentifikasi kebutuhan penunjang program. Sedangkan pengembangan kurikulum program studi dilakukan melalui perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan program kegiatan meliputi rancangan program kegiatan MBKM, penyusunan buku panduan penerapan program MBKM, dan konversi alih kredit atau SKS. Sedangkan pelaksanaan kurikulum MBKM menyesuaikan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 15 ayat 1 yang dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan baik di dalam maupun luar program studi melalui 5 program yaitu pertukaran mahasiswa, pengenalan lingkungan persekolahan, KKN tematik, dan bakti sosial.

Selanjutnya sampai kesimpulan penelitian (Prastowo, Firman, Mulyanto, & Wiranata, 2020) konsep kurikulum mandiri yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang artinya memberikan kebebasan kepada seluruh peserta didik dalam proses pembelajaran mulai dari berpendapat, berfikir, dan riset yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan agama relevan dengan konsep kurikulum merdeka belajar yang dikembangkan oleh Kemendikbud sekarang ini. Konsep pembelajaran mandiri sangat tepat untuk menghadapi era *society 5.0* yang mana pada konsep pembelajaran mandiri memberikan pola pembelajaran yang dinamis untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif, inovatif, adaptif dan profesional.

Hasil penelitian (Hasim, 2020) menyatakan bahwa, melandanya pandemi covid-19 berdampak pada kesulitan Negara Indonesia. Model pembelajaran terpaksa diubah menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, banyak keluhan terkait pelaksanaan PJJ yang mengakibatkan banyaknya hambatan mulai dari terbatasnya kuota, fasilitas, serta pemahaman peserta didik. Pemerintah melalui kemendikbud mengambil langkah kebijakan yakni membuat kurikulum yang dirasa cocok untuk diterapkan di masa pandemi covid-19 yang sering disebut kurikulum merdeka belajar. Pada perguruan tinggi, merdeka belajar dimaksudkan untuk memberikan kebebasan untuk mahasiswa mengambil bidang studi yang sesuai kebutuhan. Yang diharapkan mampu mengubah budaya belajar menjadi inovatif, kreatif dan tidak menjadi penghambat.

Organisasi kurikulum berperan penting dalam menentukan pembahasan materi yang akan diajarkan dan mekanisme mengajar. Organisasi kurikulum juga dapat didefinisikan sebagai pola dan susunan komponen pembelajaran yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit yang bertujuan agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Pengorganisasian kurikulum harus memiliki panduan yang jelas, baik teori maupun situasi nyata dilapangan. Beberapa unsur yang terdapat pada organisasi kurikulum antara lain yaitu:

1. Konsep
2. Generalisasi
3. Keterampilan
4. Nilai-nilai.

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum yaitu:

1. Ruang lingkup
2. Urutan
3. Kesenambungan
4. Terpadu
5. Keseimbangan
6. Waktu.

Diskusi

Diskusi terkait dengan orientasi capaian yang baru sampai di level kompetensi. Dalam perkembangan baru, kompetensi merupakan capaian yang masih berorientasi ke masa kini. Menurut Kamdi (2016:15) terdapat tiga orientasi pendidikan tinggi, yakni *training model*, *professional development model*, dan *capability development model*. Model pertama dan kedua sangat populer dalam pendidikan ala industrial yang "mengeksplotasi" sumber daya manusia untuk tujuan

reproduksi ekonomi melalui pendidikan. Teori efisiensi sosial yang menggambarkan bahwa kurikulum pendidikan didesain berbasis kompetensi dengan rujukan utama kebutuhan job pada area penduduk atau profesi tertentu. Tugas pendidikan adalah menjadikan proses secara efisien karena fiksasi cakupan kompetensi dalam kurikulum amat jelas, definitif, dan tidak mudah berubah. Sebaliknya, model ketiga tidak menggunakan job atau profesi tertentu sebagai rujukan utama pendidikan, melainkan menggunakan kekuatan potensial individu sebagai rujukan utama pendidikan. Orientasi pendidikan dengan model ketiga adalah pengembangan kemampuan yang melampaui kompetensi. Mencermati dasar perubahan kurikulum pendidikan tinggi yang demikian mencerminkan bahwa praksis pendidikan tinggi di Indonesia masih menggunakan model pertama dan kedua, yakni berbasis kompetensi, dan dominasi model training untuk menyiapkan mahasiswa sebagai calon pekerja. Merdeka belajar kampus merdeka merupakan terobosan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang di implementasikan pada jenjang perguruan tinggi. Dari beberapa hasil yang telah penulis kaji ditemui beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian merdeka belajar kampus merdeka, antara lain:

1. Prosedur kerjasama antara program studi dengan mitra luar perguruan tinggi
2. Perubahan PTN berbadan hukum untuk beradu di kanca internasional
3. Prosedur magang yang dilakukan dengan lembaga diluar perguruan tinggi
4. Kurangnya pemahaman SDM akan kebijakan implementasi program merdeka belajarkampus merdeka
5. Fasilitas atau teknologi yang kurang memadai di beberapa perguruan tinggi
6. Ketidaksiapan SDM dalam pengimplementasian merdeka belajar kampus merdeka.

Dari beberapa hambatan yang di hadapi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka maka di temukannya solusi yang mampu menghadapi tantangan tersebut yakni perlunya sosialisasi program untuk memberikan pemahaman bagi pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka serta mengkaji kembali kebutuhan dan juga karakteristik perguruan tinggi, karena setiap perguruan tinggi memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu perlu dikaji ulang agar dapat berkembang dalam meningkatkan mutu pendidikan secara bersama-sama.

Konsep tersebut menjadi gebrakan baru untuk menggeser paradigma linieritas yang selama ini berkembang dalam dunia pendidikan yang menciptakan adanya sekat antara bidang-bidang keilmuan. Modifikasi kurikulum melalui konsep merdeka belajar menjadi salah satu upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan beridentitas pemuda Pancasila. Konsep merdeka belajar telah lama diterapkan oleh salah satu universitas tertua di dunia. Konsep tersebut pun sejalan dengan ide bapak pendidikan bangsa Indonesia yang menginginkan sebuah sistem pembelajaran dengan mengusung kemandirian dan kreatifitas, sehingga mampu menciptakan karakter jiwa merdeka melalui eksplorasi pengetahuan dari berbagai macam sumber baik dunia nyata maupun dunia maya (Vhalery et al., 2022). Konsep tersebut lahir dari pengembangan revolusi industri yang dianggap mampu mendegradasi peran individu dalam kehidupan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan narasi diatas dapat disimpulkan di era *society 5.0*, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah dan dinamika sosial dengan menggunakan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, teknologi robot, serta *big data*. Tantangan tersebut terlihat di berbagai sektor atau bidang terutama pada pendidikan. Faktor ini adalah perubahan kurikulum di Indonesia. Ada banyak negara yang terus-menerus memperbarui kurikulum yang dibuat sebelumnya yang awalnya dianggap *ideal*, tetapi masih memiliki kekurangan dan perlu diubah, bahkan ditingkatkan. Keterkaitan erat antara kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sekolah menengah atas juga mahasiswa perguruan tinggi sebagai generasi penerus yang akan mengimplementasikan *Society 5.0* pada kehidupan sehari-hari agar dapat menyesuaikan dengan zaman yang terus memiliki inovasi yang berkembang.

Pendidikan pada masa ini membutuhkan pengetahuan dan teknik, bahkan dalam pengembangan

peserta didik yang akan menjadi sumber daya manusia masa depan. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan 4C yang terdiri dari *critical thinking, communication, collaboration, dan creativity* untuk dapat beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan yang sifatnya kompetitif dapat menjadi sebuah modal dalam memecahkan masalah agar dapat bersaing untuk menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan dunia global yang jauh lebih kompleks. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara memandang bahwa kemerdekaan belajar menitikberatkan pada cara berpikir dalam mencari pengetahuan serta menggunakan pemikirannya sendiri yang tidak tergantung pada orang lain, tetapi peserta didik berperan sebagai penguasa dalam belajar. Dengan demikian, implementasi merdeka belajar untuk menghadapi Era *Society 5.0* yang dilakukan pembelajar tersebut sudah terjalankan dengan baik. Namun, bukan hanya pembelajar tetapi pendidik juga berperan penting dalam mengimplementasikan merdeka belajar untuk menghadapi Era *Society 5.0* ini. Tentunya bila hal tersebut terus diterapkan maka akan mengembangkan SDM (Sumber Daya Manusia) berkualitas agar bisa menyelesaikan permasalahan bangsa melalui kemampuan dan keterampilan yang didapat dalam proses pembelajaran.

Daftar Pustaka

- Haqqi, H., Wijayati, H. 2019. *Revolusi Industri 4.0 di Tengah Society 5.0: Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif*. Yogyakarta: Quadrant.
- Indarta, Y., dkk. 2022. *Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar dengan Model Pembelajaran Abad 21 dalam Perkembangan Era Society 5.0*. Riau: Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol. 4, No. 2:3011-3024.
- Marisa, M. 2021. *Inovasi Kurikulum “Merdeka Belajar” di Era Society 5.0*. Palembang: Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora. Vol. 5, No.1:66–78.
- Nastiti, F., Abdu, A. 2020. *Kajian: Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0*. Malang: Edcomtech Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan. Vol. 5, No. 1:61–66.
- Sutrisno. 2011. *Pengantar Pembelajaran Inovatif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Gaung Persada.

Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi Sebagai Alternatif Pengurangan Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya

Victoria Fitriyanti*¹, Hariani Devita²

^{1,2}Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah

*Corresponding author: victoriafifi123@gmail.com

Abstrak

Virus corona (Covid-19) yang melanda dunia saat ini sangat berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan hal utama yang berdampak pada dunia kesehatan. Covid-19 telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Penyebaran virus sangat cepat di hampir semua negara-negara di dunia telah membuat perubahan besar pada kehidupan manusia. Pemerintah negara bagian, khususnya Indonesia, telah membuat berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran virus yang masif ini. Kesehatan Komunikasi dilakukan oleh pemerintah melalui media sharing dalam menyampaikan pesan-pesan terkait Covid-19 kepada masyarakat. Salah satu media yang digunakan adalah aplikasi pelacak Covid-19 bernama PeduliLindungi. Teknologi komunikasi ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan mengurangi penyebaran virus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan manfaat komunikasi pembangunan melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai media komunikasi kesehatan antar masyarakat Indonesia pemerintah dan masyarakat Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi kesehatan dan media kedua teori usia. Serta .Aktivasi aplikasi merupakan gerakan sosial dalam membangun kesadaran dan advokasi untuk penggunaan internet sebagai sumber berita sebagai kontrol informasi. Pandemi covid-19 memiliki dampak besar pada banyak aspek kehidupan konsumen, termasuk bagaimana mengakses layanan Kesehatan. Salah satu alternatif pendekatan yang telah muncul adalah Mobile Health sebagai mekanisme akses alternatif untuk layanan Kesehatan ditengah pandemi dan perawatan Kesehatan.

Kata Kunci: PeduliLindungi, covid, kesehatan

Abstract

The corona virus (Covid-19) that is currently sweeping the world has had a huge impact on social and economic life, even the main thing that has an impact on the world of health. Covid-19 has been declared by WHO as a pandemic. The spread of the virus is very fast in almost all countries in the world, it has made big changes in human life. State governments, especially Indonesia, have made various policies to prevent the spread of this massive virus. Health Communication is carried out by the government through media sharing in conveying messages related to Covid-19 to the public. One of the media used is a Covid-19 tracking application called PeduliLindungi. This communication technology is expected to provide education and reduce the spread of the virus. This study aims to examine the role and benefits of development communication through the PeduliLindungi application as a media for health communication between the Indonesian government and the people of Surabaya. This study uses both health and media communication approaches to age theory. As well as. Activation of the application is a social movement in building awareness and advocating for the use of the internet as a source of news as information control. The COVID-19 pandemic has had a major impact on many aspects of consumers' lives, including how to access health services. One alternative approach that has emerged is Mobile Health as an alternative access mechanism for health services in the midst of a pandemic and health care.

Keywords: PeduliLindungi, covid, health

Pendahuluan

Pandemi Covid 19 yang melanda hampir di seluruh dunia, terutama di Indonesia memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Pencegahan terhadap virus ini terus dilakukan oleh pemerintah negara termasuk pemerintah Indonesia. Menurut data covid19.big.go.id di Indonesia sebanyak 184.268 orang yang positif terinfeksi Covid – 19.

Sembuh 132.055 orang dan yang meninggal sebanyak 7750 orang. Sedangkan berdasarkan data www.worldometers.info/coronavirus/ Indonesia berada di urutan negara ke 23 terbanyak yang positif terinfeksi virus Covid 19 (data diambil pada tanggal 3 September 2020. Perkembangan teknologi dinilai memiliki dampak positif dalam menghambat penyebaran virus covid-19. Teknologi informasi memegang peranan dalam penyebaran informasi atau pesan positif sehingga mampu menekan jumlah korban Pandemi Covid 19 lebih banyak.(Hasyim *et al.*, 2020) Media baru yang beroperasi dalam Jaringan (internet) telah dimanfaatkan dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Dimanfaatkan oleh individu, kelompok, maupun institusi dan lembaga negara. Berbicara tentang internet dan media baru khususnya, tidak dapat kita lepaskan dari wujud media baru itu sendiri layaknya sosial media.Salah satu fungsi sosial media “saat ini” adalah fungsi pelayanan publik, dimana sosial media dimanfaatkan sebagai media pelayanan publik oleh institusi maupun lembaga negara.(Yuliani *et al.*, 2020)

Pemerintah di beberapa negara menggunakan media sosial untuk penyampaian informasi yang berkaitan dengan virus Covid 19 ke masyarakat. Negara China menggunakan program peta dan penelusur perjalanan untuk menghindari daerah yang terkena infeksi virus covid-19. Aplikasi yang bernama QuantUrban dan program WeChat, YiKuang atau "Epidemic Situation". Aplikasi ini melakukan pemetaan secara geografis, sehingga pengguna dapat mengukur seberapa dekat mereka dengan lokasi yang terinfeksi virus covid-19.

Begitupun negara India telah meluncurkan aplikasi smartphone bernama AarogyaSetu untuk membantu melacak orang positif terjangkit virus covid-19 dan orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan orang yang terjangkit virus covid-19. Microsoft Bing meluncurkan peta interaktif baru melalui situs bing untuk memberikan *update* informasi tentang penyebaran virus covid-19 secara global.(Hasyim *et al.*, 2020)

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua terbesar setelah Jakarta dengan jumlah penduduk 2,874 Juta jiwa pada tahun 2022. Dan Pemerintah Indonesia telah meluncurkan aplikasi pelacak Covid-19. PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh anak bangsa Indonesia. Aplikasi ini diperkenalkan langsung oleh Kementrian Komunikasi dan Informastika dan aplikasi tersebut diciptakan sebagai salah satu upaya untuk meredam virus Covid19. Cara kerja aplikasi ini mengandalkan partisipasi dari masyarakat.

Aplikasi pelacak Covid-19 ini menjadi media komunikasi kesehatan oleh pemerintah Indonesia bagi masyarakat dalam mencegah penyebaran virus Covid19 yang hingga saat ini masih menjadi pandemi di beberapa negara termasuk Indonesia. pemanfaatan teknologi dalam pencegahan Covid-19 harus dilakukan secara bersamaan, yaitu dari penggunaan aplikasi itu sendiri diikuti dukungan dan edukasi dari kepala daerah kepada masyarakat.

Pada penelitian ini konsep komunikasi menggunakan komunikasi kesehatan dimanatujuan dari komunikasi kesehatan pertama untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan. Kedua, komunikasi kesehatan bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari pengaruh kognitif, afektif dan psikomotorik. Penggunaan aplikasi terkoneksi dengan internet ini merupakan bentuk komunikasi kesehatan bermedia.

Menurut Liliweri (2008) Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan individu dan komunitas masyarakat, dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi baik komunikasi interpersonal, maupun komunikasi massa. Selain itu, komunikasi kesehatan juga dipahami. sebagai studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas agar dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan.(Rahmadiana, 2012)

Melalui media, promosi kesehatan bisa dilakukan secara lebih masif. Perkembangan media massa terutama yang difasilitasi oleh teknologi internet menjadi tantangan baru dalam komunikasi

kesehatan. Di satu sisi, keberadaan media baru (*new media*) ini membuka kesempatan untuk kegiatan promosi kesehatan yang lebih bersifat viral dimana keterlibatan pengguna internet bisa menjadi kunci sukses kegiatan promosi kesehatan. (Junaedi & Sukmono, 2018:13- 14).

Daya persuasi atau pengaruh suatu pesan sangat tergantung media apa yang dipilih komunikator untuk memindahkan pesan atau informasi kesehatan. Ada berapa media yang dapat digunakan, mulai dari media sensoris hingga media yang diciptakan manusia. Marshal Mc. Luchan, sosiolog asal Canada, untuk pertama kalinya mengemukakan bahwa sebenarnya teknologi media yang kita temukan sekarang tidak lain merupakan perluasan.

Teori yang di gunakan pada penelitian ini adalah teori *second media age*. Kebenaran suatu teori menawarkan berbagai perspektif “kebenaran” dari suatu. realitas tetapi bukan satu-satunya cara untuk memandang suatu realitas atau fenomena. Konsepsi suatu teori menentukan bagaimana cara manusia memandang dunia dan menjadi suatu pendekatan terhadap melihat suatu fenomena dalam kehidupan manusia. (Rorong, 2019) .

Teori *second media age* berpandangan bahwa internet telah memberi ruang (*cyberspace*) jaringan yang memiliki kemampuan tak tertandingi dalam hal interaktivitas dibanding dengan media sebelumnya. Kemampuan ini pula yang menurut Holmes dianggap sebagai pencabut *power* yang dimiliki oleh media massa. Teori tentang *cybersociety* atau *second media age* terbilang baru dalam kajian komunikasi. Bukan hanya karena bangunan premis sosialnya yang baru namun teknologi internet memang baru massif di masyarakat sejak 1991. Holmes mengungkap bahwa Luhan, Innis dan Meyrowitz adalah tokoh-tokoh yang pemikirannya mampu mendasari kajian-kajian komunikasi terkait *new media*. (Sih & Sukmi, 2015).

Pada penelitian sebelumnya Nasution (2004) mengutip pernyataan Hedebro tentang tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang berkaitan dengan tingkat analisisnya. Ketiga aspek tersebut meliputi hal berikut: Pertama Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan peran media menyumbang upaya tersebut. Di sini, politik dan fungsifungsi media massa dalam pengertian yang umum merupakan objek studi, sekaligus masalah-masalah struktur organisasional dan pemilikan, serta kontrol terhadap media. Untuk studi jenis ini, digunakan istilah kebijakan komunikasi dan merupakan pendekatan yang paling luas dan bersifat umum; kedua Pendekatan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional, namun lebih jauh spesifik. Persoalan utama dalam studi ini adalah penggunaan media agar dapat dipakai secara efisien, untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat suatu bangsa; dan Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu Studi jenis ini. mendalami bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan penerimaan yang luas akan ide-ide dan produk baru. (Amanah, 2010)

Berdasarkan pemaparan diatas permasalahan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana peranan dan manfaat komunikasi pembangunan melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai media komunikasi kesehatan antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum. (Ruslan, 2010:215) Menurut Kriyantono (2006:69) jenis penelitian deskriptif adalah jenis riset yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat populasi atau objek penelitian. Periset sudah mempunyai konsep (biasanya satu konsep) dan mendalami bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan penerimaan yang luas akan ide-ide dan produk baru. (Amanah, 2010). Berdasarkan pemaparan diatas permasalahan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana peranan dan manfaat komunikasi pembangunan melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai media komunikasi kesehatan antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Surabaya serta Melakukan pengambilan data observasi untuk mengamati secara langsung Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai Alternatif mengurangi penyebaran Covid-19 di kota Surabaya.

Data dan Sumber

Teknik pengumpulan data dengan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan. Sumber data bisa responden atau subjek penelitian dari hasil pengisian kuesioner, wawancara, observasi (Kriyantono, 2006:41-42)

Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian ini berupa wawancara terhadap masyarakat Surabaya dengan pengguna aplikasi PeduliLindungi. Wawancara dilakukan dengan teknik purposive sampling peneliti menentukan kriteria mengenai informan mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel. Ketiga informan merupakan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda berusia 20-37 tahun.

Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

1) Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti antara lain:

Peneliti melakukan observasi untuk menyajikan gambaran realistik atau kejadian nyata yang terjadi terhadap Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai Alternatif mengurangi penyebaran Covid-19 melalui analisis kualitatif deskriptif.

2) Wawancara → instrumennya: panduan wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang melakukan observasi terhadap pesan teks dan gambar serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Data sekunder dengan mengumpulkan data referensi dari literatur jurnal, buku dan website yang terkait dengan penelitian ini.

3) Observasi → lembar observasi atau catatan lapangan

- Kapan pertama kali penyakit covid menyebar di Kota Surabaya.
- Alternatif apa saja yang di upayakan agar mengurangi penyebaran covid

4) Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data ini yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam mengungkap Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai Alternatif mengurangi penyebaran covid-19 dengan pendekatan analisa terhadap narasumber.

b. Prosedur Pengumpulan data

1) Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:Online), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara pada penelitian ini dilaksanakan dengan tanya jawab kepada masyarakat yang telah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Tujuan wawancara ini dilakukan agar peneliti memperoleh data atau informasi secara mandalam mengenai Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai Alternatif mengurangi penyebaran covid-19.

2) Observasi

Menurut Sugiyono (2016:Online), observasi merupakan teknik pengolahan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung apa yang dilakukan narasumber dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai Alternatif mengurangi penyebaran covid-19.

3) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:Online), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catata harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen berbentuk karya misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan merekam layar hasil wawancara dengan infoman/narasumber terkait di lapangan.

Dalam prosedur pengumpulan data penelitian ini menggunakan berbagai prosedur antara lain:

- 1) Mempersiapkan panduan wawancara sebelum melakukan wawancara.

- 2) Melakukan Wawancara Melakukan Obsevasi.
- 3) Menggabungkan Hasil Wawancara dan Hasil Observasi.

Teknik Analisis Data

1. Teknik Penganalisisan Data

Menurut Sugiyono (2016:Online), mengemukakan teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Data Reduction (Redaksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/ Verification.

a. Redaksi Data

Menurut Sugiyono (2016:Online), data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, lalu dicari temuan polanya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data yang di sini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun serta memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi data

Pada tahap ini peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab-akibat, dan proporsisi. Kesimpulan yang didapat juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekuatannya, dan kecocokkannya, yaitu yang merupakan validitasnya.

Hasil

PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdapat bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan. Selanjutnya, jika Anda tetap berada di zona merah tersebut selama 30 menit, PeduliLindungi juga akan memberikan pengingat.

PeduliLindungi menggunakan data yang diproduksi oleh gadget dengan bluetooth aktif untuk merekam informasi yang dibutuhkan. Ketika ada gadget lain dalam radius bluetooth yang juga terdaftar di PeduliLindungi, maka akan terjadi pertukaran id anonim yang akan direkam oleh gadget masing-masing.

PeduliLindungi selanjutnya akan mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19 atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP). Hal ini akan sangat membantu ketika orang tersebut tidak dapat mengingat riwayat perjalanan dan dengan siapa saja dia melakukan kontak.

PeduliLindungi sangat memperhatikan kerahasiaan pribadi pengguna. Data disimpan aman dalam format terenkripsi dan tidak akan dibagikan kepada orang lain. Data hanya akan diakses bila dalam risiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan. Jika pernah berada di tempat yang dekat dengan kasus COVID-19 positif, baik tahu ataupun tidak tahu orangnya,

PeduliLindungi membantu petugas resmi pelacakan kontak untuk menghubungi lebih cepat. dengan begitu, lebih cepat juga menghentikan penularan COVID-19. Dengan kondisi bluetooth aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi ponsel pengguna PeduliLindungi lainnya, yang berada di radius bluetooth, dengan menggunakan scanning bluetooth untuk merekam lokasi dan waktu kontakannya. Ponsel-ponsel yang berdekatan kemudian akan saling merekam ID anonim masing-masing.

Data ID anonim tersebut akan disimpan dalam rentang waktu 14 hari. Sehingga, apabila ada seseorang yang dinyatakan sakit oleh petugas kesehatan (bukan oleh aplikasi) dan diinputkan ke sistem database, maka sistem akan memfilter ID-ID anonim lain yang terekam pernah melakukan kontak dalam waktu 14 hari terakhir.

Kemudian, petugas kesehatan dapat menghubungi pengguna ponsel lain yang ada dalam riwayat kontak tersebut untuk mengingatkan resiko kontak yang pernah terjadi. Informasi riwayat kontak ini yang akan dipakai untuk melakukan tracking saat salah satu dari pengguna dinyatakan positif Covid-19.

Hasil tracking ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran Covid-19 dapat dilakukan. Sehingga semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, akan semakin besar pula partisipasi PeduliLindungi membantu pemerintah dalam melakukan tracking.

Keberadaan media baru (new media) ini membuka kesempatan untuk kegiatan promosi kesehatan yang lebih bersifat viral dimana keterlibatan pengguna internet bisa menjadi kunci sukses kegiatan promosi kesehatan. Keterlibatan pengguna untuk mengaktifkan *bluetooth*

membuat aplikasi ini dapat berjalan maksimal dan membantu dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Teori second media age berpandangan bahwa internet telah memberi ruang (cyberspace) jaringan yang memiliki kemampuan tak tertandingi dalam hal interaktivitas dibanding dengan media sebelumnya. Jika sebelumnya media komunikasi kesehatan melalui media massa hanya menggunakan media konvensional seperti televisi dan radio.

Saat ini dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi khususnya internet telah membuat informasi kesehatan secara massal dapat diterima masyarakat dengan tepat. Aplikasi yang terdapat pada jaringan internet dapat membuat perubahan melalui gerakan sosial.

PeduliLindungi merupakan upaya gerakan sosial dalam bentuk komunikasi kesehatan. Menurut Vegh, gerakan sosial yang dilakukan di Internet dikategorikan sebagai berikut.

a.) Pertama, membangun kesadaran dan advokasi penggunaan Internet sebagai sumber berita sebagai kontrol informasi. Aplikasi PeduliLindungi membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi bertambahnya penyebaran Covid-19. Sumber informasi dan imbauan yang terdapat di aplikasi PeduliLindungi berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Situs Resmi Covid-19 Indonesia dengan Organisasi Kesehatan dunia. (WHO). Sehingga informasi yang diberikan valid dan menghindari dari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat.

b.) Kedua, pengorganisasian dan mobilisasi yaitu Internet digunakan sebagai koordinasi tindakan atau aksi nyata. Aksi nyata pengguna disini adalah saat mendownload dan mengaktifkan bluetooth aplikasi tersebut turut melacak penyebaran virus Covid-19. Dan mematuhi informasi protokoler kesehatan menghadapi penyebaran virus. (Urip, 2015) Aplikasi PeduliLindungi saat ini sudah di download oleh 1.000.000+ pengguna. Semakin banyak pengguna aplikasi ini akan memudahkan dalam pelacakan zona-zona yang terkena dampak Covid -19.

Informasi yang disampaikan pada aplikasi ini menjadi bentuk komunikasi kesehatan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid 19. Aplikasi ini merupakan media komunikasi kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini KEMINFO, Kementerian BUMN dan didukung oleh operator Telkom. Aplikasi pelacak Covid19 ini menjadi media komunikasi kesehatan dalam bentuk media sensori yang bisa dilihat dalam bentuk teks dan gambar dan berupa mechanical media dalam bentuk aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet.

Tujuan dari komunikasi kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan. Terlihat dalam fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi tersebut. Tidak hanya mendeteksi keberadaan daerah dengan positif Covid tetapi juga menghadirkan fitur sosialisasi dan protokoler kesehatan dalam menghadapi pandemi ini. Berdasarkan data yang didapatkan pada riset oleh F.Dea (2020) sebagian besar masyarakat telah menerapkan beberapa protokol kesehatan seperti; menggunakan masker, penerapan

social distancing atau physical distancing dan penerapan etika batuk dan bersin dengan baik. Namun penerapan protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan tangan belum dilakukan dengan benar. Sebanyak 52,3% dan 56,9% peserta tidak mencuci tangan sebelum makan dan tidak membawa hand sanitizer saat bepergian sebagai bentuk self protection. (Dea & Pinasti, 2020)

Pada gambar di atas dapat terlihat fitur untuk memberikan informasi kapan kita harus memeriksakan diri ke dokter. Saat dihubungi oleh petugas kesehatan, sebagai hasil analisa aplikasi PeduliLindungi, berarti kita memiliki riwayat kontak dengan penderita Covid-19 positif, PDP, atau ODP. Maka kita harus memeriksakan diri ke dokter. Fitur lainnya bagaimana cara mencegah penyebaran Covid 19 seperti menjaga kesehatan, etika batuk, hingga protokoler kesehatan untuk menjaga jarak dan menggunakan masker yang tepat.

Gambar selanjutnya Informasi lokasi dampak Covid dan RS/klinik rujukan terdekat Selanjutnya lokasi terdekat yang berdampak juga akan ditampilkan begitu pula info Rumah Sakit maupun klinik terdekat yang dapat didatangi. Lievrouw dan Livingstone (2006) berpandangan bahwa terdapat tiga komponen dalam media baru yakni alat yang digunakan untuk berkomunikasi, aktivitas, dan praktek komunikasi, dan tatanan sosial atau tatanan organisasi yang berkembang di new media. (Junep, 2016).

Pada aplikasi ini menggunakan mobile phone sebagai alat dalam komunikasi organisasi pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid19 yang mempengaruhi segala perubahan tatanan sosial di masyarakat. Tujuan komunikasi kesehatan yang kedua adalah untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari pengaruh kognitif, afektif dan psikomotorik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 3 pengguna aplikasi ini. Ketiga informan tersebut berusia 20-37 tahun dengan latar belakang berbeda :

(1) Informan A seorang ibu rumah tangga, (2) Informan B seorang pegawai swasta dan (3) Informan C adalah mahasiswa.

Secara kognitif aspek yang berkaitan dengan pengetahuan, bersifat mental menggunakan pemikiran dan penalaran. Berdasarkan hasil wawancara dari aspek kognitif ketiga informan mendapatkan pengetahuan informasi mengenai virus Covid-19, antara lain protokol kesehatan yang tepat, keberadaan klinik terdekat hingga yang utama adalah informasi mengenai status zona covid-19 daerah dimana mereka tinggal atau pun saat bepergian. Sedangkan aspek afektif adalah yang berkaitan dengan sikap, emosi dan nilai. Dan aspek psikomotor terhadap tindakan.

Informan A dan B merupakan perempuan memiliki emosi yang lebih waspada dan berhati-hati menghadapi Covid -19 ini. Saat mereka menyadari zona tempat tinggal atau tempat yang akan mereka kunjungi merupakan zona merah. Mereka akan lebih memilih mengurangi aktivitas di luar rumah.

Sedangkan informan C tetap seperti biasa melakukan kegiatan dengan tetap mengikuti protokoler kesehatan. Informasi kesehatan lainnya yang didapatkan oleh ketiga informan adalah periksa kesehatan mandiri dan link dengan aplikasi kesehatan untuk berkonsultasi tentang kesehatan tanpa harus mengunjungi dokter.

Interaksi dengan paramedis dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Berdasarkan pemaparan diatas, aspek komunikasi pembangunan pada penelitian ini. Peran media dalam hal ini aplikasi PeduliLindungi yaitu melakukan kontrol informasi terkait pemberitaan kesehatan menghadapi pandemi Covid19. Sumber informasi berasal dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Informatika.

tudi ini menggambarkan kebijakan komunikasi dalam penggunaan media agar dapat dipakai secara efisien, untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat Indonesia dan Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan aktivitas komunikasi untuk mempromosikan informasi kesehatan terkait Covid19. Dan diharapkan dapat mencegah penyebaran virus Covid19.

Diskusi

Aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi pelacak Covid-19 menjadi media komunikasi kesehatan pemerintah kepada masyarakat menghadapi pandemi Covid19. Komunikasi pembangunan dalam era digital menjadikan media ini sebagai media partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita Covid-19 dapat dilakukan. Informasi pada aplikasi ini memberikan kewaspadaan kepada masyarakat terhadap

penyebaran virus Covid-19. Dalam bentuk aplikasi yang portable membuat Pemerintah menjadikan aplikasi kesehatan ini sebagai media komunikasi kesehatan dalam bentuk media sensori dan mechanical media. Dengan mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi masyarakat Surabaya dan masyarakat Indonesia melakukan gerakan sosial dalam membangun kesadaran dan advokasi penggunaan Internet sebagai sumber berita sebagaikontrol informasi.

Selain itu Kesehatan dan lainnya. Berikut dampak positif perkembangan teknologi dalam dunia Kesehatan :

1.) Memudahkan akses layanan Kesehatan

Banyak layanan kesehatan juga hadir secara online. Sehingga mampu memberikan kemudahan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien dapat mengakses informasi, layanan konsultasi dengan dokter, hingga membeli obat secara online. Jadi hal tersebut dapat menghemat waktu pasien. Dengan kemudahan itu, diharapkan pasien lebih peduli terhadap kesehatan masing-masing.

2.) Mempersingkat waktu tunggu pasien

Dengan aplikasi itu, pasien tidak perlu menunggu berjam-jam hingga mendapatkan pemeriksaan dari dokter maupun tenaga medis lainnya. Pasien dapat membuat janji online dengan dokter. Bahkan, banyak aplikasi yang menyediakan fitur konsultasi dokter secara online atau tanpa tatap muka langsung. Sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien. Penanganan secara tepat dapat diperoleh pasien lebih cepat.

3.) Mencegah penularan penyakit

Selain untuk pasien dan tenaga medis, teknologi juga dapat mencegah penularan penyakit. Contohnya pandemi Covid-19 seperti saat ini. Dengan menggunakan aplikasi Pedulilindungi, masyarakat dapat mengetahui status kesehatan masing-masing. Juga informasi tentang klasifikasi daerah terjangkit Covid-19. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk menghindari daerah mana saja dengan intensitas penyakit lebih tinggi. Penularan penyakit pun lebih mudah dicegah.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi yang besar untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh negara berkembang maupun negara yang sedang berkembang dengan menyediakan akses cepat, cost effective, dan perawatan kesehatan yang berkualitas. Salah satu pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan, adalah telemedika. Dengan teknologi telemedika dapat membantu penderita penyakit serta lembaga kesehatan untuk saling berbagi informasi dengan mudah dan cepat. Salah satu latar belakang pembuatan aplikasi ini didasari pada jumlah penderita yang banyak. Selama bertahun-tahun, serangan jantung menempati urutan pertama kematian di seluruh dunia (Cleveland Clinic 2010). Pada tahun 2008 penyakit yang berhubungan dengan jantung (cardiovascular disease atau CVD) mencatat urutan pertama penyebab kematian di dunia, yaitu mencapai 17 juta orang. Sedangkan di Indonesia, kematian akibat CVD mencapai 30% dari total populasi. (World Health Organization 2011)

Sedangkan Pandemi Covid 19 yang melanda hampir di seluruh dunia, terutama di Indonesia memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Pencegahan terhadap virus ini terus dilakukan oleh pemerintah negara termasuk pemerintah Indonesia. Menurut data covid19.big.go.id di Indonesia sebanyak 184.268 orang yang positif terinfeksi Covid – 19. Sembuh 132.055 orang dan yang meninggal sebanyak 7750 orang. Sedangkan berdasarkan data www.worldometers.info/coronavirus/ Indonesia berada di urutan negara ke 23 terbanyak yang positif terinfeksi virus Covid 19 (data diambil pada tanggal 3 September 2020).

Perkembangan Teknologi di Era Digital

Dalam satu dekade terakhir ini, dunia kesehatan mengalami perubahan atau disrupsi yang cukup besar. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini akan mempermudah pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan. Dulu, pasien yang harus mendekati diri dengan penyedia layanan kesehatan. Sekarang, penyedia layanan kesehatanlah yang mendekati diri ke pasien. Bayangkan, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter hanya melalui aplikasi online di ponsel pintar. Begitu juga dengan pemesanan obat,

pemeriksaan laboratorium, dan perawatan di rumah. Dipadu dengan jasa transportasi daring, pasien tidak perlu ke mana-mana untuk mendapatkan obat, informasi, dan layanan kesehatan. Cukup duduk sembari memainkan jemari di atas ponsel pintar.

Bahkan sekarang sudah ada sistem pembuatan perjanjian konsultasi dokter secara daring dimana pasien dapat membuat, melihat, atau mengubah jadwal konsultasi sesuai kebutuhannya hanya melalui aplikasi seluler atau via SMS.

Di Indonesia, teknologi di bidang kesehatan digital mulai berkembang di era 90-an dengan diperkenalkannya istilah telemedika (telemedicine). Yaitu, praktik pelayanan kesehatan dengan menggunakan perangkat komunikasi audio, visual, dan data untuk kepentingan konsultasi, diagnosis, perawatan, serta pengobatan. Memasuki era milenium, teknologi kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis dan pereseapan elektronik. Situs informasi kesehatan juga semakin menjamur dan dilengkapi dengan fitur konsultasi daring dengan dokter secara *real-time* dan apotik daring.

Dalam hal ini perkembangan teknologi di bidang Kesehatan tentunya memiliki tantangan tersendiri yaitu :

Sejatinya, kemajuan dalam teknologi kesehatan memiliki tujuan utama, yaitu mempersingkat berbagai proses layanan kesehatan yang rumit dan memakan waktu. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak sesederhana itu. Meski tak sering, ada kasus-kasus di mana kemajuan teknologi ini berbenturan dengan masalah etika medis. Bisa jadi karena memang berbagai pemangku kebijakan terkait tidak siap dengan cepatnya perkembangan yang ada. Seperti di Indonesia, pemerintah sebetulnya mendukung layanan kesehatan digital. Namun, hal ini tidak dibarengi dengan kecepatan dalam mengeluarkan regulasi atau kebijakan terkait.

Selain keamanan, kepemilikan data, aspek privasi, berbagi data, serta perizinan, perlu dipikirkan juga bagaimana upaya perlindungan konsumen. Karena perkembangan teknologi kesehatan berbasis digital bersifat terbuka, para pemangku kebijakan sangat perlu bertindak cepat untuk mengantisipasi hal ini.

Daftar Pustaka

- Amanah, S. (2010). Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Februari, 08(1).
- Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana. Prenada Media Group.
- Sugiyono.(2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Yuliani, F., Adriadi, R., & Safitra, L. (2020). Media Baru Dalam Pelayanan Publik. *Commed : Jurnal Komunikasi Dan Media*, 4(2), 149.
- Urip, M. (2015). Gerakan Sosial di Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Gerakan Sosial Melalui Hashtag “ShameOnYouSBY” di Twitter). Tesis. Program Magister Ilmu Komunikasi. Universitas Diponegoro.
- Hasyim, H., Rizki Pratama Suroso, R., & Profesional Makassar, S. (2020). Peranan Teknologi Informasi Dalam Upaya Pencegahan Virus COVID-19 di Lingkungan Universitas. *CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 4(2), 124–129
- Harahap, R. A., & Putra, F. E. (2019). Buku Ajar Komunikasi Kesehatan. Prenadamedia Group. Dea, F., & Pinasti, A. (2020). *Wellness And Healthy Magazine Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan*